



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

**STASIUN PSDKP BELAWAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**



Kata Pengantar

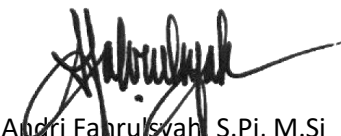
Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2021 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) di Tahun 2021 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan (UPT Stasiun PSDKP Belawan)

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff UPT Stasiun PSDKP Belawan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Belawan, 14 Januari 2022

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan Belawan



Andri Fahrulsyah S.Pi, M.Si
NIP. 19780901 200212 1 002

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Ditjen. Penyusunan Lkj pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun bersangkutan.

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, UPT Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun perjanjian kinerja Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Pengelolaan kinerja di lingkungan UPT Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga ditujukan untuk:

1. Menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*)
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Sasaran Kegiatan UPT Stasiun PSDKP Belawan bermuara pada 7 Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: ⁽¹⁾Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan; ⁽²⁾Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan; ⁽³⁾ Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat; ⁽⁴⁾ Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP; ⁽⁵⁾ Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP; ⁽⁶⁾ Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan dan ⁽⁷⁾ Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian Sasaran Kegiatan, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada Tahun 2021, sebagai hasil dari implementasi BSC, terdapat 20 IKU pengawasan SDKP yang menjadi komitmen kinerja UPT Stasiun PSDKP Belawan. Pencapaian IKU Tahun 2021, dari 20 IKU level UPT Stasiun PSDKP Belawan terdapat 1 (satu) IKU berwarna kuning serta 19 (sembilan belas) IKU berwarna hijau (terealisasi 100%). IKU berwarna kuning tersebut adalah IKU Ke-2 “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, dimana pada tahun 2021 capaiannya hanya 96,3%. Capaian ini belum memenuhi target tahun 2021 sebesar 100%, karena pada persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan belum semua di lakukan penginputan pada aplikasi Simwaskan, dimana penginputan pada aplikasi Simwaskan merupakan salah satu indikator untuk penilaian dengan nilai capaian 0,2. Terkendalanya penginputan pada aplikasi Simwaskan ini

diakibatkan karena pada beberapa Satwas dan wilker belum mendukung jaringannya. Terkait dengan kendala di atas, Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Stasiun PSDKP Belawan telah berkoordinasi dengan bapak Deni (bagian Simwaskan) terkait kendala tersebut. Dari hasil koordinasi ini, pak Deni memberikan saran agar Stasiun PSDKP Belawan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Penerbitan SLO dapat dilakukan secara offline dengan format pencatatan sesuai dengan format excel yang dapat di unduh di simwaskan.djpsdkp.kkp.go.id.
 - Rekap penerbitan SLO offline di unggah pada simwaskan.djpsdkp.kkp.go.id.
2. Saran dari bapak Deni, sudah di laksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan, tetapi terkendala saat di unggah;
3. Kendala gagal unggah file SLO offline pada aplikasi simwaskan telah di laporkan kepada bapak Deni melalui group Simwaskan with UPT (terlampir);
4. Kendala SLO ini juga telah di sampaikan kepada Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan dengan nomor surat : B.4958/Sta.2/PW.110/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 Perihal Pemberitahuan Kendala SLO Online (terlampir).

Realisasi anggaran tahun 2021 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai 31 Desember 2021 sebesar **98,90%** atau sebesar Rp **48.729.298.897,-** (*Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu Rp. 49.272.101.000,- (*Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Satu Ribu Rupiah*). Anggaran pada tahun 2021 tersebut telah mengalami revisi pada bulan November 2021, dimana anggaran sebelum revisi adalah sebesar 49.438.013.000,- (*Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Belas Ribu Rupiah*). Melalui Laporan Kinerja Tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Perencanaan Tahun 2021.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud Dan Tujuan	1
C. Data Umum Organisasi	2
D. Isu Aktual	4
E. Sistematika Penyajian Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 – 2024	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	8
C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2021	12
1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021.....	12
B. Analisis Pencapaian Kinerja.....	14
1. Sasaran Program 1 : Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan.....	14
2. Sasaran Program 2 : Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan Perikanan.....	39
3. Sasaran Program 3 : Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	48
4. Sasaran Program 4 : Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	51
5. Sasaran Program 5: Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP	56
6. Sasaran Program 6 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan.....	64
7. Sasaran Program 7 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	70

C. Perbandingan Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dengan Satker UPT Sejenis/Setara..	81
D. Akuntabilitas Keuangan	88
BAB IV PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	90
LAMPIRAN	91

Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021.....	9
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021	12
Tabel 3. Tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	15
Tabel 4. Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan tahun 2020 dan tahun 2021.....	16
Tabel 5. Hasil Pengukuran IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	17
Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan renstra tahun 2020-2024	17
Tabel 7. Perhitungan efisiensi Sasaran Program -1 “Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”.....	18
Tabel 8. Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau <i>Apendiks Cites</i> yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	19
Tabel 9. Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	21
Tabel 10. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	26
Tabel 11. Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan.....	28
Tabel 12. Pelaku usaha Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan Nasional yang di Perikasa Kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	34
Tabel 13. Tahapan pemeriksaan persentase pelaku usaha perikanan yang di periksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	39
Tabel 14. Capaian IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”	40
Tabel 15. Perbandingan Capaian IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan renstra tahun 2020-2024	41
Tabel 16. Perhitungan efisiensi Sasaran Program-2 “Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”	42
Tabel 17. Tahapan pemeriksaan kapal perikanan dikatakan taat.....	43
Tabel 18. Tahapan pemeriksaan unit usaha pengolahan hasil perikanan dikatakan taat	44
Tabel 19. Tahapan pemeriksaan unit usaha distribusi hasil perikanan dikatakan taat	46
Tabel 20. Tahapan pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan dikatakan taat.....	47

Tabel 21. Hasil Pengukuran IKU Persentase Tindak Lanjut Informasi Pokmaswas Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	49
Tabel 22. Perbandingan Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Informasi Pokmaswas Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan renstra tahun 2020-2024.....	50
Tabel 23. Perhitungan efisiensi Sasaran Program-1 “Persentase Tindak Lanjut Informasi Pokmaswas Lingkup Stasiun PSDKP Belawan”	50
Tabel 24. Capaian Presentase Terselenggaranya pemantauan dan Operasi Armada SDKP Tahun 2021	51
Tabel 25. Perbandingan Capaian IKU Presentase Terselenggaranya pemantauan dan Operasi Armada lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan renstra tahun 2021-2024	52
Tabel 26. Perhitungan efisiensi Sasaran Program-4 “Persentase Terselenggaranya pemantauan dan Operasi Armada Lingkup Stasiun PSDKP Belawan”	52
Tabel 27. Hari Operasi Kapal Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	53
Tabel 28. Hari Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	55
Tabel 29. Capaian IKU pada Sasaran Program 5 “Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP”	56
Tabel 30. Capaian Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan	58
Tabel 31. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	58
Tabel 32. Capaian IKU “Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”	60
Tabel 33. Perawatan KP Hiu 01 dan KP Hiu 08 Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	61
Tabel 34. Perawatan Speedboat Pengawasan Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	63
Tabel 35. Capaian IKU pada Sasaran Program- 6 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan”	64
Tabel 36. Data kasus TPKP yang di tangani Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021	65
Tabel 37. Perbandingan Capaian IKU Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan renstra tahun 2020-2024	68
Tabel 38. Perbandingan Capaian IKU Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan renstra tahun 2020-2024	69
Tabel 39. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	70
Tabel 40. Perbandingan Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan renstra tahun 2020-2024	71
Tabel 41. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	72

Tabel 42. Perbandingan Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan renstra tahun 2020-2024	43
Tabel 43. Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	74
Tabel 44. Perbandingan Capaian IKU Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan renstra tahun 2020-2024.....	74
Tabel 45. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	75
Tabel 46. Perbandingan capaian IKU “indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” pada 2019 sampai tahun 2021	75
Tabel 47. Perbandingan Capaian IKU “indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024	76
Tabel 48. Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	76
Tabel 49. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari – Desember 2021	82

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan	4
Gambar 2. Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas	54
Gambar 3. Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan speedboat.....	55
Gambar 4. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	67
Gambar 5. Capaian IKU Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	80
Gambar 6. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan.....	80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan tahun 2021 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan - kegiatan yang menjadi fokus Stasiun Pengawas SDKP Belawan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Belawann (RKT).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan *stakeholders* lainnya.

2. Tujuan :

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap bulan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tahun berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Belawan merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Belawan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi,serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam

menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Umum, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

a) Kepala Stasiun :

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan dilingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Urusan Umum:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

c) Pelaksana Koordinasi Urusan Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran:

Melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

d) Pelaksana Koordinasi Urusan Sarana dan Prasarana Pengawasan:

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

e) Jabatan Fungsional:

Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/ 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, sebagai mana Struktur Organisasi pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Belawan

D. Isu Aktual

Isu aktual yang di hadapi Stasiun Pengawasan SDKP Belawan dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Masih dijumpai kegiatan penangkapan yang tidak ramah lingkungan atau Alat Tangkap Terlarang seperti penggunaan Trawl;
2. Masih terjadi konflik antar nelayan berhubungan dengan alat tangkap dan daerah penangkapan;
3. Terjadinya degradasi lingkungan pesisir (mangrove, terumbu karang, lamun) akibat aktivitas manusia (*anthropogenic activities*).
4. Tidak optimalnya hari operasi speedboat disebabkan oleh kerusakan mesin speedboat Napoleon.
5. Kurangnya armada speedboat untuk patroli disebabkan pada tahun 2019, 1 Unit Speedboat Dolphin 005 telah di lelang.
6. Masih ditemukan kapal kapal perikanan ukuran > 30 GT yang terpantau / terdapat indikasi pelanggaran menangkap ikan di luar daerah penangkapan ikan;
7. Pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan (oleh industry unit pengolahan ikan).

E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Triwulan IV Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perjanjian Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾Rencana Strategis Ditjen. PSDKP Tahun 2021; ⁽²⁾ Rencana Kinerja Belawann (RKT) Tahun 2021 dan ⁽³⁾ Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021.

A. Arah Kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2015-2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon IV, Eselon VI dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut
 - b. Pertukaran data
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*).

- d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, ⁽⁴⁾ sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Stasiun PSDKP Belawan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui aplikasi berbasis teknologi melalui Aplikasi Kinerjaku. Implementasi Aplikasi Kinerjaku dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Belawan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;

2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Pembahasan PK Awal

Jumlah Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Belawan pada awal periode tahun 2021 berjumlah Sasaran Kegiatan (SS) 7 (Tujuh) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) berjumlah 20 (Dua Puluh). Pada tahun berjalan terdapat perubahan Kebijakan penganggaran dan perencanaan kinerja sehingga PK harus dilakukan penyesuaian. PK hasil revisi pada bulan Februari tahun 2021 karena adanya Revisi Penghematan Anggaran tanpa merubah Jumlah Sasaran Kegiatan ataupun Indikator Kinerja Utama (IKU), perubahan terjadi hanya karena perubahan Anggaran. Pada bulan Agustus 2021, terjadi refocusing anggaran dari Rp. 51.048.535.000 menjadi Rp. 49.438.013.000 dan pada bulan November 2021 juga terjadi refocusing anggaran dari Rp. 49.438.013.000 menjadi Rp. Rp. 49.272.101.000. Adanya revisi anggaran tersebut mengakibatkan terjadinya revisi target pada IKU Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan dan IKU Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya sebelum dan sesudah revisi pada setiap Sasaran Strategis (SS) ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Sebelum Revisi	Target Sesudah Revisi
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	95	95
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmakwas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	71	71
4.		4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	1,81	1,8

	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	0,11	0,04
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6. Persentase penyelesaian pembangunan Kapal kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100
		7. Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100
		8. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	9. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	93
		10. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	93
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	11. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80	80
		12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80	80
		13. Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	75	75
		14. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	73	73
		15. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	90	90
		16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	72,5	72,5
		17. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	72,5	72,5
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	84	84
		19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	89	89

		20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	86	86
--	--	--	----	----

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2021

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, berdasarkan implementasi dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2021 Stasiun PSDKP Belawan telah menyempurnakan dan menetapkan 7 (Tujuh) Sasaran Strategis (SS) dengan 20 (Dua puluh) IKU. Capaian kinerja Tahun 2021 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Persentasi
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	95	100	105,26
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	96,3	96,3
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmakwas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	71	71	100
4.	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	1,8	1,83	101,67
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	0,04	0,0438	109,50
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan	6. Persentase penyelesaian pembangunan Kapal kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100
		7. Persentase penyelesaian pembangunan prasarana	100	100	100

	prasarana Pengawasan SDKP	pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)			
		8. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	9. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	97,5	104,84
		10. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	94,88	102,02
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	11. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80	88,92	111,15
		12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80	90,47	113,09
		13. Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	75	78,98	105,31
		14. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	73	81,27	111,33
		15. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	90	96,08	106,76
		16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	72,5	100	120
		17. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	72,5	96,29	120
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	84	98,89	117,73

		19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	89	91,02	102,27
		20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	86	88,11	102,45

Penjelasan warna:

NO	WARNA	KETERANGAN
1		Baik (Skor >=100)
2		Hati-hati (80 <=Skor<100)
3		Buruk (Skor < 80)
4		Belum Ada Skor

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Selama periode Tahun 2021 Stasiun PSDKP Belawan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 : Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan

Pencapaian Sasaran Program “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **“Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”** Ukuran keberhasilan IKU tersebut diperoleh dari agregasi 5 (lima) Sub IKU Pengawasan SDK yaitu: ⁽¹⁾ Persentase Jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽²⁾ Persentase Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽³⁾ Persentase Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽⁴⁾ Persentase Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan; ⁽⁵⁾ Persentase Kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Untuk mengukur capaian IKU **Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan** dilakukan dengan tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dilakukan dengan rincian sebagaimana tabel 3 berikut.

Tabel 3.Tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Surat Perintah Tugas (SPT)	0,10	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	0,70	Berita Acara Pengawasan (form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	0,20	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Pada tahun 2021 IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan ditargetkan dengan persentase 95% kepatuhan pelaku usaha. Capaian pada tahun 2021 melebihi dari yang ditargetkan yaitu dengan capaian 100% pelaku usaha yang di periksa kepatuhannya dengan persentase capaian 105,26%. Untuk mencapai target tersebut, Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat pengawasan setiap bulan.

Rapat tersebut dilaksanakan untuk memonitoring kegiatan pengawasan pada bulan sebelumnya dan merencanakan kegiatan pengawasan pada bulan berjalan. Dengan di laksanakan rapat pengawasan ini diharapkan Stasiun PSDKP Belawan dapat memonitoring pencapaian pada target yang telah di berikan dan menemukan solusi atau pengendalian terhadap kendala-kendala yang di hadapi.

2. Melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku usaha.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan para pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah pelaku usaha yang diperiksa pada tahun 2021 sebanyak 38 pelaku usaha, capaian ini lebih besar bila di bandingkan dengan jumlah pelaku usaha kelautan yang diperiksa pada tahun 2020 yaitu sebanyak 22 pelaku usaha. Perbandingan capaian pelaku usaha kelautan yang di periksa pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dapat di lihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Perbandingan Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan tahun 2020 dan tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021
1	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau <i>Apendiks Cites</i> yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	2	2
2	Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	6	12
3	Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	1	3
4	Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	10	9
5	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan	3	12
Total Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan		16	38

Namun Pencapaian IKU Presentase pelaku usaha kelautan yang di periksa kepatuhannya pada tahun 2021 tidak dapat di bandingkan dengan capaian tahun 2020, karena pada tahun 2020 IKU tersebut berupa “Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan” sementara pada tahun 2021 IKU nya berupa “Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”. Capaian IKU ke-1 “Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, sebagaimana pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Pengukuran IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2020	Capaian tahun 2021	Persentase (%)
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	95	Tidak ada capaian karena IKU ini baru ada pada tahun 2021.	100	105,26%

IKU ini merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 dan baru ada pada review renstra tahun 2021. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 6. Perbandingan Capaian IKU Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	95	100	16 pelaku usaha.	95	95	95	95

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 267.000.000 dan sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 256.240.512 atau sebesar 95,97% dengan tingkat efisiensi pada Sasaran Strategis 1 sebesar 47,5%. Tingginya tingkat efisiensi tersebut dikarenakan jumlah realisasi yang melebihi target yang sudah ditentukan dengan penggunaan anggaran tidak sampai 100%. Perhitungan capaian efisiensi anggaran untuk Sasaran Program ke-1 ini dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Perhitungan efisiensi Sasaran Program -1 “Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Efisiensi Sasaran Strategis ($\sum(9)/(6)$) :		101,4%						
Periode : Tahun 2021								
No	Output Program pada SK tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)
2352.BIC.001	Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya	2	2	1	25.000.000	23.801.184	25.000.000	1.198.816
2352.BIC.002	Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya	4	12	3	58.000.000	57.564.710	174.000.000	116.435.290
2352.BIC.003	Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya	3	3	1	44.500.000	43.304.000	44.500.000	1.196.000
2352.BIC.004	Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	9	9	1	91.500.000	86.259.125	91.500.000	5.240.875
2352.QIC.001	Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya	3	12	4	48.000.000	45.311.493	192.000.000	146.688.507
TOTAL		21	38	10	267.000.000	256.240.512	527.000.000	270.759.488

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator kinerja Utama pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Adapun capaian pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan tahun 2021 yaitu 2 pelaku usaha kategori “Taat” Rincian pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebagaimana tabel 8 dibawah ini:

Tabel 8. Pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendiks Cites* yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
1	<p>Nelayan di DAS Barumun di sekitar Panai Hulu dan Panai Tengah dan monitoring pelaku pengumpul ikan dilakukan di wilayah Labuhan Bilik, Kabupaten Labuhan Batu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan bersama - sama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Labuhan Batu dan BPSPL Padang. Pengawasan dilakukan terhadap nelayan dan pengumpul hasil tangkapan ikan terubuk; - Hasil pengawasan di DAS Barumun berhasil masih menemukan 7 (tujuh) nelayan kecil yang menggunakan kapal motor (pompong) dengan alat penangkapan Jaring Insang (Gill Net) untuk menangkap ikan terubuk, pada kegiatan ini petugas menyampaikan aturan terkait larangan penangkapan ikan Terubuk pada bulan tertentu dengan cara lisan dan membagikan Selebaran (leaflet) serta menghimbau para nelayan untuk mematuhi; - Pengawasan terhadap pelaku usaha pengumpul ikan hasil tangkapan berhasil mewawancarai 2 (dua) orang pelaku usaha yaitu Bapak Junaidi dan Khairul Amin, kedua pelaku usaha pengumpul ikan Terubuk ini telah dilakukan sejak tahun 1980an dengan sarana prasarana yang sederhana, rata-rata ikan Terubuk yang dikumpulkan berjumlah 5 ekor/hari dengan tujuan pemasaran lokal dan Rantau Prapat; - Tindak Lanjut terhadap pelaku usaha pengumpul hasil perikanan, Pengawas - Perikanan menyampaikan sosialisasi mengenai ketentuan larangan penangkapan Terubuk sesuai Kepmen Nomor 43/KEPMEN KP/2016 serta meminta komitmen para pelaku pengumpul untuk mendukung kegiatan tersebut dengan menandatangani surat pernyataan.
2	<p>Bapak Rozali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan bersama - sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Riau (UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah II); - Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) unit kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan terubuk (<i>Tenualosa macrura</i>) dan ditemukan 1 (satu) pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan terubuk yaitu bapak Rozali dengan alasan ekonomi; - Kepada bapak Rozali diberikan Surat Peringatan pertama dan membuat Surat Pernyataan tidak melakukan penangkapan sesuai dengan Kepmen KP No. KEP.59/MEN/2011;

No	NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Nelayan lainnya yang diperiksa adalah Azmi, Muhammad Naim, Wira, Juandi Saputra dan Mansur; - Alat tangkap yang digunakan adalah Gillnet; - Pengawas Perikanan memberikan sosialisasi Kepmen Kepmen-KP No.59/MEN/2011 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (<i>Tenualosa macrura</i>) kepada para nelayan.

Sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi anggaran dalam mendukung kegiatan ini sebesar Rp.23.801.184 (95,20%) dari anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp.25.000.000,-. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai 100% dari target dengan anggaran yang digunakan sebesar 95,20% (perhitungan pada tabel 7).

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendiks Cites* yang diperiksa kepatuhannya, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan.

b. Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Adapun capaian pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan tahun 2021 yaitu 12 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebagaimana tabel 6 dibawah ini:

Tabel 9. Pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

NO	NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
1	Wisata Bahari CV. Pantai Bali Lestari	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata Bahari ini terletak di pinggir Pantai Cermin dengan luasan sebesar kurang lebih 12 Ha. CV. Pantai Bali Lestari berdiri pada tahun 2007 namun sempat tutup dan dibuka kembali tahun 2016 dan dikelola oleh pemilik usaha bernama Bapak Salim. Menurut keterangan bapak Susiandy bahwa CV. Pantai Bali Lestari telah mengelola limbahnya dengan baik dan sudah memiliki dokumen perizinan berusaha, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan urut Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor: 8120110261482 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Pelenggara OSS pada tanggal 18 Desember 2018 untuk KBLI Karaoke, Taman Rekreasi/Taman Wisata; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Izin Usaha berupa Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dengan Nomor: 8120017271199 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Pelenggara OSS pada tanggal 19 Desember 2018 untuk KBLI Restoran dan Warung Makan.
2	Wisata Bahari Pantai Cermin & Resort Hotel	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Cermin Theme Park & Resort Hotel dikelola oleh PT Kawasan Wisata Pantai Cermin yang beralamat di Dusun 1, Desa Pantai Cermin Kanam, Pantai Cermin, Pantai Cermin Kanan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dengan titik koordinat 3°39'5" LU 98°59'18" BT yang berdiri sejak tahun 2007; - Berdasarkan kegiatan pengawasan wisata bahari yang dilakukan di Pantai Cermin Theme Park Resort & Hotel dapat disimpulkan bahwa Pantai Cermin Theme Park Resort & Hotel belum dapat menunjukkan dokumen perizinan apapun selama dua tahun berturut-turut dilakukan pengawasan. Namun terkait pengelolaannya Pantai Cermin Theme Park Resort & Hotel dapat dikategorikan sebagai tempat wisata yang ramah lingkungan. - Diperlukan tindak lanjut terkait perizinan yang belum dimiliki oleh PT Kawasan Wisata Pantai Cermin.
3	Wisata Bahari Pantai Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat wisata ini berada di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara pada koordinat 03°16'5.6" LU - 099° 34'39.38" BT; - Pantai Sejarah belum memiliki izin khusus sebagai tempat wisata. Namun menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

NO	NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
		<p>Kehutanan Nomor 5467/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 tanggal 28 Agustus 2018 memberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kepada kelompok tani Cinta Mangrove seluas ± 456 Ha dan Pantai Sejarah berada dalam kawasan ini. Izin pemanfaatan yang diberikan berupa pemanfaatan kawasan, pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi terbatas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ditemukan adanya indikasi kerusakan lingkungan.
4	Wisata Bahari Pantai Bunga	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat wisata ini berada di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara pada koordinat 03°13'26.5" LU - 099° 34'39.38" BT; - Terkait perizinan pengelolaan kawasan ini masih dalam proses pengurusan; - Tidak ditemukan adanya indikasi kerusakan lingkungan.
5	Pengelolaan Pasir Laut Bapak Nazaruddin di Desa Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau	<ul style="list-style-type: none"> - Di Pulau Rupert ini pernah ada kelompok masyarakat penambang pasir yang bernama Mitra Usaha Rupert yang diketuai oleh bapak Samrianto, kelompok ini sudah tidak aktif sejak tahun 2018 karena kendala perizinan; - Di pulau rupert ini pernah ada PT penambang pasir illegal tanpa perizinan dengan nama PT Rupert Jaya Mandiri , PT ini sekarang tidak beroperasi lagi karena sudah ditindaklanjuti langsung oleh Dit Pol Airud Daerah Riau; - Di desa ini masih ditemukan tempat tumpukan pasir laut milik bapak Nazaruddin pada titik koordinat (01°43'11,94528" LU 101°27'33,45156"BT). Pasir laut ini dijual di sekitar Kecamatan Rupert guna memenuhi kebutuhan bangunan masyarakat setempat ,pengawas perikanan mengambil tindakan persuasif mengingatkan larangan penambangan pasir laut tanpa perizinan; - Berdasarkan hasil wawancara dengan staff kelurahan tanjung kapal tidak adanya pengaduan / keluhan nelayan terhadap dampak hasil tangkapan mereka.
6	Pengelolaan Pasir Laut Bapak Jon Kamisran di Desa Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Di Pulau Rupert ini pernah ada kelompok masyarakat penambang pasir yang bernama Mitra Usaha Rupert yang diketuai oleh bapak Samrianto, kelompok ini sudah tidak aktif sejak tahun 2018 karena kendala perizinan; - Di pulau rupert ini pernah ada PT penambang pasir illegal tanpa perizinan dengan nama PT Rupert Jaya Mandiri , PT ini sekarang

NO	NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
	Bengkalis, Provinsi Riau	<p>tidak beroperasi lagi karena sudah ditindaklanjuti langsung oleh Dit Pol Airud Daerah Riau;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di desa ini masih ditemukan tempat tumpukan pasir laut milik bapak Bapak Jon Kamisran pada titik koordinat (01°43'28,23456" LU 101°27'46,64052"BT). Pasir laut ini dijual di sekitar Kecamatan Rupa guna memenuhi kebutuhan bangunan masyarakat setempat , pengawas perikanan mengambil tindakan persuasif mengingatkan larangan penambangan pasir laut tanpa perizinan; - Berdasarkan hasil wawancara dengan staff kelurahan tanjung kapal tidak adanya pengaduan / keluhan nelayan terhadap dampak hasil tangkapan mereka.
7	Pengawasan BMKT di Kabupaten Batubara	<ul style="list-style-type: none"> - Dari hasil Pengawasan di titik tenggelamnya kapal, tidak ditemukan adanya, aktivitas pengambilan, penyelaman dan pengangkutan BMKT dan untuk pengawasan di gudang dan lokasi tempat pembongkaran BMKT tidak ditemukan adanya aktivitas yang berhubungan dengan BMKT; - Pada saat ini, tidak ditemukan kegiatan pengangkutan BMKT di sekitar lokasi tenggelamnya kapal oleh PT. FOI (Frankly Ocean Indonesia).
8	Wisata Bahari Pantai Mangrove Kuala Nipah, Desa Sei Naga Lawan, Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Mangrove di Kuala Nipah, Desa Sei Naga Lawan, Kec. Perbaungan, Kabupaten Serdang - Bedagai, Provinsi Sumatera Utara terletak pada titik koordinat N 3 35'26. 376 E 99 05'36.2625"; - Wisata Mangrove ini menyuguhkan tempat edukasi ataupun pengenalan tentang tumbuhan pohon mangrove bagi Pengunjung yang datang ke Pantai ini. Seperti yang di ketahui fungsi utama hutan mangrove adalah sebagai pelindung garis pantai dari abrasi dan menahan gelombang besar. Pantai ini sudah ada sejak tahun 2004 yang dikelola oleh Bapak Sutrisno dan Ibu Jumiaty dan anggota kelompok yg lain dengan nama kelompok Koperasi Serba Usaha (KSU) baim bai; - Fasilitas di tempat wisata ini sudah memadai, karena sudah terdapat kantin yang menyediakan makanan hasil laut, pondok dengan harga Rp.20.000 - Rp.50.0000 atau tergantung ukuran pondok, mushola, toilet, area parkir kendaraan, area memancing dan terdapat 3 buah homestay, 1 homestay berisi 1 kasur ukuran sedang dan satu kipas angin, kamar ini muat untuk 4 orang dan juga sudah ada coffe shop;

NO	NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Pantai Mangrove dapat dilihat bahwa wisata bahari ini memiliki fasilitas yang lengkap dan telah dikelola dengan baik. Tidak ditemukan adanya pelanggaran ataupun indikasi dampak kerusakan lingkungan akibat usaha ini. Dan pemanfaatan Pantai mangrove ini sudah memiliki izin pengelolaan dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.4108/MENLHK-PSKL/PKPS/PSLO-6/2020 Tanggal 29 Juni 2020 dengan luas izin pengelolannya ±2 Ha, Kelompok mendapatkan izin Selama 35 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun.
9	Wisata Bahari Pantai Jono (Koperasi Masyarakat Pantai SuJono)	<ul style="list-style-type: none"> - Wisatainya terletak di Dusun Masjid Timur, Kel. Lalang, Kec. Medang Deras, Kab. Batubara, Prov. Sumatera Utara tepatnya pada koordinat 03°23'11.6"LU 099°24'40.7" BT; - Pengawasan dilakukan dengan pendampingan dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Batubara (Kabid Pariwisata Bapak Fahrizal Abdi); - Izin Lokasi diberikan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS kepada : Koperasi Masyarakat Pantai Jono dengan nomor NIB 8120201982453. Luas lahan 10 Ha dan jenis kegiatan objek wisata pantai. Diterbitkan pada tanggal 25 September 2018; - Izin Pengelolaan diberikan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dengan Nomor 556/443/DISPORAPAR/2020 kepada Koperasi Masyarakat Pantai Sujono (KMPJ) terhitung mulai tanggal 10 Juni 2020 s/d 27 Agustus 2023; - Pengelolaan pantai Jono saat ini diambil alih oleh pemerintah kabupaten Batubara sejak 18 Juli 2021 karena adanya permasalahan manajemen yang terjadi di koperasi Masyarakat Pantai Jono; - Pada saat pelaksanaan pengawasan tidak ditemukan adanya indikasi kerusakan lingkungan yang berdampak pada sumberdaya perikanan dan lingkungannya.
10	Wisata Bahari Pantai Serambi Deli, Desa Paluh Sebaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Prov.	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Serambi Deli dibuka pada tahun 2015 pada awalnya dikelola oleh kelompok masyarakat Desa Paluh Sebaji. Kemudian pada tahun 2017 dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Bersama. Pengawas lokasi dilakukan oleh bapak Abdul Hamid selaku badan pengawas BUMDES. - Perizinan diberikan oleh Kepala Desa Paluh Sebaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

NO	NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
	Sumatera Utara (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Bersama)	- Tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran ataupun dampak kerusakan lingkungan yang signifikan dari kegiatan wisata bahari yang diawasi.
11	Wisata Bahari Pantai Muara Indah, Desa Denai Kuala, Kec.Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara (Kelompok Kemitraan Lingkungan Muara Indah Jaya Mandiri Desa Denai Kuala)	<ul style="list-style-type: none"> - Wisata bahari yang diawasi adalah Pantai Muara Indah yang terletak di Desa Denai Kuala, Kec.Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara terletak pada titik koordinat 3 40'30. 756" N - 98° 56'37.6188" E; - Pemanfaatan Pantai Muara Indah ini memiliki dokumen izin Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara KPH Wilayah I Stabat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan Kelompok Kemitraan Lingkungan Muara Indah Jaya Mandiri Desa Denai Kuala, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan nomor pihak pertama 074/0138 dan Nomor pihak kedua 01/MIJM-DK/I/2019; - Pantai Muara Indah memiliki luas area 1.200 km² dengan panjang 4000 m dan garis pantai yang dimanfaatkan ±2000 m.
12	Wisata Bahari Pantai Ketapang , Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau (Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sungai Cingam)	<ul style="list-style-type: none"> - Pantai Ketapang merupakan sebuah destinasi alam bahari yang berada di Desa Sungai Cingam, Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tepatnya pada titik koordinat 01°58'32,56968"LU - 101°46'24,8466"BT; - Pantai ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sungai Cingam Jaya; - Tidak ditemukan adanya indikasi kerusakan lingkungan akibat kegiatan wisata bahari.

Realisasi anggaran s/d 31 Desember 2021 sebesar Rp.57.564.710,-(99,25%) dari anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp.58.000.000,-. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai 100% dari target dengan anggaran yang digunakan sebesar 99,25% (perhitungan pada tabel 7).

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga)

Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan.

c. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Adapun capaian pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu 3 pelaku usaha kategori “**Taat**” Rincian pelaku usaha pemanfaatan pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebagaimana tabel 10 dibawah ini:

Tabel 10. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

NO	NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
1	Oge (Penanggung Jawab Pulau Salah Nama)	<ul style="list-style-type: none"> - Pulau Salah Nama atau Pulau Salah Namu berlokasi di Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara terletak pada titik koordinat N 3 20’4680 E 99 43.3460”. - Pulau Salah Nama ini di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan Bapak Oge sebagai penanggung jawab untuk kegiatan Pariwisata. - Fasilitas di Pulau Salah Nama ini sudah cukup memadai karena sudah ada penginapan dan toilet tapi untuk kebutuhan air tawar masih sangat kurang dan sumber energy listrik juga belum ada. Untuk saat ini sumber energy listrik di Pulau Salah Nama menggunakan PLTS (Pembangkit Listri tenaga Surya) yang daya pemakaian nya juga sangat terbatas. - Dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Pulau Salah Nama dapat dilihat bahwa Pulau Salah Nama ini sangat berpotensi menjadi tempat wisata dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar tapi karena sulitnya air tawar dan tidak adanya energy listrik sangat berpengaruh pada

NO	NAMA PELAKU USAHA	HASIL PENGAWASAN
		kebutuhan pengunjung dan penghuni pulau dalam beraktifitas dalam Hal MCK dan masak.
2	Pulau Pandang	<ul style="list-style-type: none"> - Pulau pandang merupakan pulau yang berada di Kabupaten Batubara dan berjarak 10 KM dari Pulau Salah Nama. - Pulau Pandang ini di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara. - Fasilitas di Pulau Pandang ini sudah cukup memadai karena sudah ada penginapan dan toilet tapi untuk kebutuhan air tawar masih sangat kurang dan sumber energy listrik juga belum ada - Dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap Pulau Pandang dapat dilihat bahwa Pulau Pandang ini sangat berpotensi menjadi tempat wisata dan berdampak positif
3	UD. Pondok Permai	<ul style="list-style-type: none"> - UD. Pondok Permai berada di Dusun III, Kota Pari, Kec. Pantai Cermin, Kab.Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara; - Usaha ini bergerak di bidang jasa “Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling” dengan No. KBLI 47112 dan nama perusahaan “UD. Pondok Permai; - Pada saat melakukan kegiatan pengawasan, Pengawas Perikanan bertemu dengan Ibu Rusmiati, selaku Penanggung Jawab bidang Marketing di Pantai Pondok Permai. Pemilik Usaha, yaitu Bapak Lau Boen Tjiok (WNI), sedang tidak berada di tempat; - Terdapat bangunan yang berada di atas air dengan luas total 795,3 m2. Bangunan ini berdiri sudah sekitar 5 tahun dan memiliki izin lokasi berupa dokumen Surat Penggunaan Perairan Bangunan di Atas Air. UD. Pondok Permai juga telah membayar sewa perairan bangunan di atas air melalui Sistem Informaasi PNB Online (SIMPONI); - Dokumen yang dimiliki berupa Nomor NIB: 9120209542316 tanggal 21 Mei 2019 dan Izin Lokasi/ Surat Penggunaan Perairan Bangunan di Atas Air Nomor KU.007/1/1/UPP.PC-2016 tanggal 21 Februari 2016.

Sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi anggaran dalam mendukung kegiatan ini sebesar Rp.43.304.000 (97,31%) dari anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan ini sebesar Rp.44.500.000,-. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu: capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai 100% dari target dengan anggaran yang digunakan masih 97,31% (perhitungan pada tabel 7).

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pemanfaatan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan.

d. Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Adapun capaian pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan tahun 2021 mencapai 9 pelaku usaha. Rincian jumlah pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan sebagaimana tabel 11 dibawah ini:

Tabel 11. Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
1	PT. Sorby International Medan	- PT. Sorby International Medan berada di Jl. Pulau Irian, Kawasan Industri Medan, Komplek Miel Nusantara I No. 3A. Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa udang beku dan ikan beku;

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan ini sudah memiliki dokumen perizinan usaha yang diwajibkan dan juga sudah memiliki dokumen perizinan lingkungan; - PT. Sorby International Medan telah memiliki saluran pembuangan air limbah hasil aktivitas pengolahan hasil perikanan dan pengelolaan terhadap limbah tersebut dilakukan dengan sistem IPAL terpadu oleh PT KIM.
2	PT. Bahari Makmur Sejati	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Bahari Makmur Sejati berada di Jl. Pulau Sumatera No.13 KIM 1. Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa udang beku jenis vannamei; - Perusahaan ini sudah memiliki dokumen perizinan usaha yang diwajibkan dan juga sudah memiliki dokumen perizinan lingkungan; - PT. Bahari Makmur Sejati telah memiliki saluran pembuangan air limbah hasil aktivitas pengolahan hasil perikanan dan pengelolaan terhadap limbah tersebut dilakukan dengan sistem IPAL terpadu oleh PT KIM.
3	PT. Ayu Bumi Sejati	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Ayu Bumi Sejati berada di Jl. Medan – Belawan Km. 17,5, Pekan Labuhan, Medan Labuhan, Sumatera Utara. Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa udang beku dan paha kodok beku. Produk-produk hasil olahan tersebut dipasarkan ke luar negeri terutama yaitu ke Uni Eropa; - PT. Ayu Bumi Sejati telah memiliki saluran pembuangan air limbah hasil aktivitas pengolahan hasil perikanan dan pengelolaan terhadap limbah tersebut dilakukan dengan sistem pengendapan dan penyaringan yang kemudian dibuang ke Sungai Deli.
4	CV. Na Rahmat	<ul style="list-style-type: none"> - CV. NA RAHMAT beralamat di Jl. Medan – Banda Aceh, Kel. Gampong Baru, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, Provinsi Aceh dengan titik koordinat latitude 4.960248, longitude 97.772415; - Perusahaan ini merupakan perusahaan pengolahan produk perikanan dengan komoditas yang dihasilkan yaitu berupa ikan beku. Produk-produk hasil olahan tersebut dipasarkan ke lokal dalam negeri;

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap CV. NA RAHMAT meliputi pengecekan terhadap dokumen perizinan yang dimiliki oleh perusahaan, manajemen pengelolaan limbahnya, dan juga melihat laporan hasil uji sampel air yang dilakukan terhadap air buangan limbah industri perusahaan; - Air yang digunakan oleh CV. NA RAHMAT untuk keperluan produksinya berasal dari sumur bor. Limbah yang dihasilkan dari proses CV. NA RAHMAT berupa limbah cair yang berasal dari air yang digunakan pada saat kegiatan pembilasan dan pencucian bahan baku, pembersihan lantai dan juga peralatan kerja air pencucian bahan baku. Penanganan limbah di CV. NA RAHMAT dilakukan dengan membuang dan mengalirkan air limbah proses ke parit kemudian ke pelabuhan; - Di dalam menjalankan usahanya, CV. NA RAHMAT belum memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dikarenakan perusahaan ini berlokasi di kawasan industri PPN IDI. Akan tetapi kawasan industri PPN IDI sendiri belum memiliki IPAL Terpadu., sehingga dapat dikatakan belum melakukan pengolahan limbah yang baik karena limbah tersebut langsung dibuang dialirkan ke pelabuhan. Selain itu, perusahaan ini belum pernah melaksanakan uji laboratorium sample limbah cair hasil aktivitas pengolahan hasil perikanan
5	PT. Anugerah Alam Industri	<ul style="list-style-type: none"> - PT Anugerah Alam Industri beralamat di Jl. Jala IV No.32 LK. III Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan; - Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengolahan ikan seperti penggaraman, pengeringan, dan pembekuan; - Perusahaan ini memiliki dokumen seperti Surat Izin Usaha Perikanan nomor 523.3/1105 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov. SU, Izin Lingkungan nomor 0032/0028/2.3/0202/05/2019 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dan UKL-UPL nomor 660/3552/BLH/XII/2012 yang ditebitkan oleh Dinas

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
		<p>Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Anugerah Alam Industri telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kapasitas terpasang sebesar 1.500 m3. Sedangkan buangan hasil operasional UPI yang diolah per harinya ialah sebesar 600 m3 per hari; - Dari hasil uji sampel air terakhir yang dilakukan oleh PT Anugerah Alam Industri, hasil uji sampel air berada dibawah baku mutu.
6	CV. Sea Malaka	<ul style="list-style-type: none"> - CV. Sea Malaka Trade terletak di Jl. Ampera Dusun 5 Bagan Asahan Pekan, Provinsi Sumatera Utara; - Perusahaan ini memiliki izin usaha dengan nomor : 8120206733812 serta termasuk dalam kategori UPI yang bergerak dalam bidang Pendinginan/Pengesian Ikan; - Adapun yang berpotensi menjadi sumber pencemaran adalah air limbah dari proses pengolahan produk - produk perikanan; - Perusahaan ini memiliki bak Kontrol kecil untuk menampung air limbah dan sisa produk sebelum di buang ke perairan; - UPI ini rutin melakukan uji air limbah tiap enam bulan ke Sucofindo dan uji terakhir dilakukan pada bulan Juni dan semua parameter yang diuji (Fisika,Kimia dan Biologi) berada di bawah nilai ambang batas.
7	PT. Halindo Berjaya Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Halindo Berjaya Mandiri terletak di Jl. Burhanuddin Lk.II, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara; - Perusahaan ini bergerak dalam bidang Pembekuan Ikan, telah memiliki dokumen perizinan usaha berupa SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan Nomor Induk Berusaha 8120101890393; - PT. Halindo Berjaya Mandiri telah memiliki IPAL dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai Nomor 503/178/IPAL-AP/PM-PPTSP-2020 dan hasil uji air limbah memiliki Sertifikat Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
		Sumatera Utara sesuai baku mutu air limbah peraturan KLH No. 5 Tahun 2014;
8	Koden Sirari	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pengawasan pencemaran dilaksanakan pada tanggal 15 - 17 September 2021 di Usaha Pembudidayaan Ikan (KJA) milik Bapak Koden Sirari; - Usaha KJA bapak Koden Sirari ini merupakan usaha skala kecil dan tidak memiliki izin; - Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan pengamatan visual di keramba. Air pada keramba terlihat jernih dan pakan ikan yang digunakan merupakan jenis pakan apung sehingga meminimalisir endapan; - Pada kegiatan ini, dilakukan juga pengambilan sampel air dan akan di lakukan pemeriksaan kualitas perairannya melalui Laboratorium Sucofindo; - Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, pengawas perikanan tidak menemukan indikasi adanya pelanggaran di lokasi usaha. Pengawas merekomendasikan agar selalu dilakukan pengujian kualitas air secara rutin.
9	PT. Suri Tani Pemuka	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi pengawasan adalah PT. Suri Tani Pemuka unit Tilapia Farm Tambun Raya yang berada di danau Toba, yaitu desa Pematang Tambun Raya, kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara; - Perusahaan telah memiliki izin usaha dengan dengan Nomor Induk Berusaha 8120001702648; - Izin Lingkungan diterbitkan oleh BPPT Kabupaten Simalungun nomor 188.45/501/10752/IL/BPPT/2015 - Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan dari BLH Kabupaten Simalungun melalui Surat Rekomendasi Nomor: 1168/Sekrt-2015; - Pengujian kualitas air di keramba yang terbaru dilakukan pada bulan Juli 2021. Pengambilan sampel dilakukan pada 2 (dua) titik, yaitu BLH 1 (pada lokasi kerambah) dan BLH 2 (berjarak 50 meter dari keramba). Pengujian kualitas air dilakukan di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan yang merupakan UPT dari Kementerian Kesehatan. Hasil uji dari semua parameter tidak melebihi kadar

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
		maksimum yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air di lokasi usaha adalah baik (normal)

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.86.259.125,- atau 94,27% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 91.500.000. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai sesuai target dengan anggaran yang digunakan sebesar yaitu 94,27% (perhitungan efisiensi pada tabel 7).

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan.

e. Pelaku usaha Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan Nasional yang di Periksa Kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Adapun capaian pengawasan pelaku usaha Pemanfaatan Kawasan konservasi yaitu 12 pelaku usaha. Rincian pelaku usaha Pemanfaatan Kawasan konservasi sebagaimana tabel 12 dibawah ini:

Tabel 12. Pelaku usaha Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan Nasional yang di Periksa Kepatuhan nya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
1	Pengawasan Ekosistem Mangrove di Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan mangrove yang diawasi yaitu Ekowisata Mangrove Belawan Sicanang yang berada di titik koordinat 3°45'32" LU dan 98°39'2" BT; - Pada tahun 2015, masyarakat kelurahan Belawan Sicanang membuat kesepakatan dengan pemerintah untuk menetapkan 187 hektar sebagai Daerah Perlindungan Mangrove (DPM) berbasis masyarakat; - Pengawasan hutan mangrove yang berada di kelurahan Belawan Sicanang, Medan Belawan, telah dikembangkan menjadi kawasan ekowisata, setelah diresmikan pada Senin 20 Oktober 2019. - Dari kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap ekosistem hutan bakau di Sicanang, Belawan, diketahui bahwa seluas sekitar 895 Ha merupakan kawasan hutan mangrove , kemudian daerah DPM seluas sekitar 187 Hektar; - Kondisi mangrove di Sicanang tergolong baik.
2	Pengawasan Ekosistem Mangrove Desa Bandar Rahmat, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa titik di kawasan pesisir desa Bandar Rahmat dimanfaatkan warga sekitar untuk kegiatan perikanan berupa tambak dan pabrik tepung ikan; - Menurut Sekretaris Kepala Desa Bandar Rahmat, pabrik tepung ikan tersebut bernama CV. Atlantik dan telah beroperasi sejak puluhan tahun yang lalu; - Baik tambak dan pabrik tepung ikan, keduanya saat ini tidak beroperasi disebabkan akses jalan menuju Desa mengalami kerusakan; - secara umum wilayah pesisir desa Bandar Rahmat dalam kondisi cukup baik meskipun di beberapa sisi ditemukan pemanfaatan.
3	Pengawasan Ekosistem Mangrove bapak Muhammad Yamin di Desa Pematang Sei Baru, Kecamatan Tanjungbalai	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan di Desa Pematang Sei Baru, Kecamatan Tanjungbalai; - Di Desa Pematang Sei Baru, Kecamatan Tanjungbalai ditemukan adanya dapur arang pada posisi 03°4'32.8" LU - 099° 48'38.2" BT. Dapur arang ini sudah tidak beroperasi lagi. Menurut keterangan Kepala Desa, pemilik dapur arang tersebut adalah Kelompok Tani dan Nelayan

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
		<p>Mandala. Pengawas Perikanan menemui salah satu pengurus kelompok tersebut yaitu bapak Muhammad Yamin;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurut bapak Muhammad Yamin perizinannya dirintis tahun 2013 yang diawali dengan permohonan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan mulai aktif tahun 2018. namun pada akhir tahun 2019 operasioanal dapur arang dihentikan karena adanya konflik internal antar pengelola; -
4	Pengawasan Ekosistem Mangrove Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Silo Laut, Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan di Desa Silo Laut, Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara; - Di Desa Silo Laut, Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara dilakukan pengawasan terhadap pembangunan tracking mangrove dan pemanfaatan lokasi mangrove yang digunakan sebagai nursery mangrove; - kawasan ini dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Cinta Mangrove (izin dari Kemenhut). Kawasan mangrove berada pada koordinat 03°6'56.8" LU - 099° 47'5.1" BT dengan luas sekitar 346 Ha; - Pemanfaatan kawasan mangrove sudah sesuai dengan perizinan.
5	Panglong Arang Ponimin	<ul style="list-style-type: none"> - Panglong Arang Ponimin terletak di Tanjung Jangkang Desa Tanjung, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya pada titik koordinat 0°59'23,10324" LU dan 102°40'51,66804" BT; - Arang dikirim menggunakan kapal ke Batam lalu diekspor ke Malaysia (Port Klang) dan Singapura; - Kegiatan pemanfaatan/ pengelolaan mangrove pada kedua panglong arang diatas dipayungi oleh dokumen perizinan yang dimiliki Koperasi Silva yaitu Surat Keputusan; - Kondisi mangrove di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung Tinggi Barat dan Desa Batin Suir, Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Riau setelah dilakukan mengalami kerusakan di beberapa titik akibat adanya kegiatan penebangan mangrove yang terus

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
		menerus dilakukan untuk kebutuhan produksi panglong arang (dapur arang).
6	Panglong Arang Sumadi	<ul style="list-style-type: none"> - Panglong Arang Sumadi terletak di Sei Nyirih Suir Kiri, Desa Batin Suir Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tepatnya pada titik koordinat 0°57'19,7" LU dan 102°42'36,8" BT; - rang dikirim menggunakan kapal ke Batam lalu diekspor ke Malaysia (Port Klang) dan Singapura; - Panglong Arang Sumadi memiliki NIB Nomor 9120015202188 tanggal 28 Desember 2019 dan Izin Lokasi tanggal 28 Desember 2019; - Kegiatan pemanfaatan/ pengelolaan mangrove pada kedua panglong arang diatas dipayungi oleh dokumen perizinan yang dimiliki Koperasi Silva yaitu Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 106/HK/KPTS/VI/2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman kepada Koperasi Silva Seluas ± 578 Hektar di Kabupaten Kepulauan Meranti;
7	Ekowisata Jembatan Wisata Mangrove Saka Raja mangrove	<ul style="list-style-type: none"> - Mangrove yang diawasi adalah : Ekowisata Jembatan Wisata Mangrove Saka Raja mangrove berlokasi bagian sisi Sungai Lalang, anak Sungai Suir, Desa Sesap, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dengan titik koordinat 0°57'37.7"LU - 102°40'58.8"BT; - Dasar hukum pembentukan ekowisata Jembatan Wisata Mangrove Saka Raja Desa Sesap adalah adalah Peraturan Desa Sesap No. 7 tahun 2000 tentang Pengelolaan Wisata Desa Sesap dan Keputusan Kepala Desa Kecamatan Tebing Tinggi No. 38 tahun 2020 tentang pembentukan kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti; - Ide pembentukan ekowisata Jembatan Wisata Mangrove Saka Raja didasarkan atas kondisi ekosistem mangrove di Desa Sesap, dimana masih terjaganya jenis vegetasi mangrove yang berusia tua dan berukuran besar di kawasan ini, seperti dari jenis Rhizophora spp., sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung dari dalam dan luar desa untuk datang ke kawasan mangrove ini;

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Luasan mangrove di kawasan ini adalah ± 4 Ha; - Kondisi ekosistem mangrove di kawasan ekowisata Jembatan Wisata Mangrove Saka Raja Desa Sesap semakin membaik sejak pertama kali ditetapkannya kawasan ini sebagai kawasan ekowisata mangrove.
8	Kelompok Tani Mekar	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan di wisata mangrove Lubuk Kertang yang dikelola oleh Kelompok Tani Mekar; - Kelompok Tani Mekar yang merupakan pengelola kawasan mangrove telah menandatangani perjanjian kerja sama kemitraan kehutanan dengan KPH Wilayah I Stabat; - Luas ekosistem hutan mangrove Desa Lubuk Kertang adalah 1.200 ha dimana sebanyak 410 ha hutan bakau dikelola oleh Kelompok Tani Mekar dan sebanyak 96 ha dikelola oleh Kelompok Telukku Indah sedangkan sisanya sedang menunggu izin kemitraan kehutanan (KULIN KK); - Dokumen perizinan yang dimiliki oleh Kelompok Tani Mekar adalah Peraturan Desa Lubuk Kertang No. 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Kawasan Mangrove dan Peraturan Kepala Desa Lubuk Kertang NO. 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Daerah Perlindungan Mangrove (DPM).
9	Abdul Maad	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Perikanan mengunjungi kawasan wisata Mangrove Mekar bahari yang berada di titik koordinat 3° 40' 45.3534" LU dan 98° 54' 57.0702" BT yang dikelola oleh Bapak Ma'ad; - Luasan mangrove di daerah ini sekitar 29,4 Ha menurut dan dimanfaatkan untuk wisata 19,6 Ha; - Kerusakan kawasan mangrove disebabkan oleh abrasi pantai.
10	Bapak Alamsyah	<ul style="list-style-type: none"> - Ekowisata mangrove Desa Insit merupakan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh Bapak Alamsyah, karena lahan tersebut merupakan milik pribadi; - Bapak Alamsyah secara mandiri menanam mangrove di lahan miliknya, dan setelah belasan tahun mangrove tersebut tumbuh dan baru dimanfaatkan sebagai area ekowisata;

NO	NAMA PELAKU USAHA	OBJEK PENGAWASAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Luas lahan yang dimiliki Bapak Alamsyah 0,8 Ha dan hanya 0,02 Ha yang dimanfaatkan untuk ekowisata.
11	Desa Lemang	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan mangrove yang diawasi adalah Ekowisata mangrove Desa Lemang dan Desa Anak Setatah dikelola oleh pemerintah desa; - Area yang dijadikan ekowisata mangrove di Desa Lemang Hanya 0,5 H dari total luas lahan 3 H, sedangkan di Desa Anak Setatah, area yang dijadikan wisata mangrove sekitar 3 ha dari total mangrove 350 ha; - Ekowisata Mangrove Desa Lemang dan Ekowisata Cinta Mangrove Desa Anak Setatah merupakan usaha BUMDes yang secara legalitas telah disahkan melalui kepaladesa setempat;
12	Desa Anak Setatah	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan mangrove yang diawasi adalah Ekowisata mangrove Desa Lemang dan Desa Anak Setatah dikelola oleh pemerintah desa; - Area yang dijadikan ekowisata mangrove di Desa Lemang Hanya 0,5 H dari total luas lahan 3 H, sedangkan di Desa Anak Setatah, area yang dijadikan wisata mangrove sekitar 3 ha dari total mangrove 350 ha; - Ekowisata Mangrove Desa Lemang dan Ekowisata Cinta Mangrove Desa Anak Setatah merupakan usaha BUMDes yang secara legalitas telah disahkan melalui kepaladesa setempat;

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.45.311.493,- atau sebesar 94,40% dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp. 48.000.000,-. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan belum efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu : capaian kinerja pada Sub IKU ini telah tercapai dari target dengan anggaran yang digunakan 94,40% (perhitungan efis.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi yang diperiksa kepatuhannya, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 orang di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas

PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan.

2. Sasaran Program 2: Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan

Pencapaian Sasaran Program “Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan” diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **“Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”**

Capaian persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2021 mencapai 96,3%. Capaian ini belum memenuhi target tahun 2021 sebesar 100%, karena pada persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan belum semua di lakukan penginputan pada aplikasi Simwaskan, dimana penginputan pada aplikasi Simwaskan merupakan salah satu indikator untuk penilaian dengan nilai capaian 0,2. Terkendalanya penginputan pada aplikasi Simwaskan ini diakibatkan karena pada beberapa Satwas dan wilker belum mendukung jaringannya. Berikut indikator penilaian untuk IKU **“Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”**

Tabel 13. Tahapan pemeriksaan persentase pelaku usaha perikanan yang di periksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,1	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,3	Berita Acara Hasil
3	Pemeriksaan Kelayakan teknis	0,4	Pemeriksaan
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,2	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Terkait dengan kendala di atas, Stasiun PSDKP Belawan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Stasiun PSDKP Belawan telah berkoordinasi dengan bapak Deni (bagian Simwaskan) terkait kendala tersebut. Dari hasil koordinasi ini, pak Deni memberikan saran agar Stasiun PSDKP Belawan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Penerbitan SLO dapat dilakukan secara offline dengan format pencatatan sesuai dengan format excel yang dapat di unduh di simwaskan.djpsdkp.kkp.go.id.
 - Rekapitulasi penerbitan SLO offline di unggah pada simwaskan.djpsdkp.kkp.go.id.
2. Saran dari bapak Deni, sudah di laksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan, tetapi terkendala saat di unggah;
 3. Kendala gagal unggah file SLO offline pada aplikasi simwaskan telah di laporkan kepada bapak Deni melalui group Simwaskan with UPT (terlampir);
 4. Kendala SLO ini juga telah di sampaikan kepada Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan dengan nomor surat : B.4958/Sta.2/PW.110/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 Perihal Pemberitahuan Kendala SLO Online (terlampir).

IKU Ke-2 “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan” ini baru ada pada tahun 2020 sehingga tidak dapat di bandingkan dengan capaian 5 tahun sebelumnya tetapi hanya dapat di bandingkan dengan capaian tahun 2020. Capaian pada tahun 2021 ini lebih kecil bila di bandingkan dengan capaian pada tahun 2020 yang memiliki capaian sebesar 100%. Capaian IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, diperoleh dari hasil pengukuran 4 (empat) Sub-IKU, sebagaimana pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Capaian IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021
1	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100%	85,2%
2	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100%	100%
3	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021
4	Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100%	100%
Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan		100	100%	96,3%

IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2021-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 15 berikut :

Tabel 15. Perbandingan Capaian IKU Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100	100	100	100	100	100	100

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.088.940.000 dan sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 1.053.393.607 atau sebesar 96,74% dengan tingkat efisiensi pada Sasaran Program- 2 sebesar 54,1%. Tingginya tingkat efisiensi tersebut dikarenakan jumlah realisasi pengawasan yang melebihi target yang sudah ditentukan pada RKAKL dengan tingkat penggunaan anggaran hanya sebesar 96,74%. Perhitungan capaian efisiensi anggaran untuk Sasaran Program -2 ini dapat dilihat pada tabel 16 di bawah ini.

Tabel 16. Perhitungan efisiensi Sasaran Program-2 “Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Efisiensi Sasaran Strategis ($\sum(9)/(6)$):		54,1%						
Periode : Tahun 2021								
No	Output Program pada SK tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)
2353.BIC.001	Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya	70	117	1,67	242.083.000	239.793.978	404.624.443	164.830.465
2353.BIC.002	Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya	31	52	1,68	135.857.000	121.974.179	227.889.161	105.914.982
2353.QIC.001	Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya	1523	1766	1,16	527.000.000	522.489.038	611.084.701	88.595.663
2353.QIC.003	Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya	36	78	2,17	184.000.000	169.136.412	398.666.667	229.530.255
TOTAL		1660	2013	6,68	1.088.940.000	1.053.393.607	1.642.264.972	588.871.365

Untuk Pembahasan capaian kinerja masing-masing sub IKU yang berkontribusi pada pencapaian kinerja “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Nilai capaian Sub-IKU tersebut diperoleh dari jumlah kapal yang diperiksa kepatuhannya yang laik operasi lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Kapal yang diperiksa kepatuhannya yang sesuai dengan IKU “Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Belawan” Pencapaian ini diupayakan melalui kegiatan: Monitoring dan evaluasi ketaatan kapal melalui Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan yang beroperasi di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, yang menangkap ikan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Berdasarkan hasil analisis selama bulan Juli sampai dengan September 2021. Untuk Pencapaian Persentase

penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan lingkup lingkup Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 17 Berikut:

Tabel 17. Tahapan pemeriksaan kapal perikanan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,1	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,3	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan teknis	0,4	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,2	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian kapal perikanan yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) pada Tahun 2021 sebanyak 1.766 unit kapal perikanan. Dari 1.766 unit kapal yang di periksa tersebut, pada tahun 2021 hanya sebanyak 459 kapal yang telah di lakukan penginputan ke aplikasi Simwaskan sedangkan 1.307 unit kapal belum di lakukan penginputan pada aplikasi Simwaskan karena adanya gangguan jaringan dimana pada beberapa satwas dan wilker, jaringan untuk melakukan input Simwaskan ini belum mendukung. Berdasarkan perhitungan tahapan pemeriksaan tersebut diperoleh nilai sebesar 85,2%. Kapal perikanan yang tidak laik operasional pada Tahun 2021 di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan diberikan Surat Keterangan Pengganti SLO sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 522.489.038,- atau sebesar 99,14 % dari anggaran yang dialokasikan sebesar RP. 527.000.000,- (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah*). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sebesar 85,2% dan target pengawasan telah melebihi dari target pada RKAKL dengan realisasi anggaran sebesar 99,14% (perhitungan efisiensi dapat dilihat pada tabel 16).

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga)

Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan.

b. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Pengawasan UPI skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi usaha yang memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan Sertifikat *Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP)* serta Sertifikat Kesehatan/*Health Certificate (HC)* bagi usaha yang pengekspor produk perikanan. Sedangkan pengawasan UPI skala kecil (Usaha Mikro Kecil dan Kelompok Pengolah Pemasar) dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu Tanda Daftar Perusahaan/Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDP/TDUP) atau PIRT, serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya Bahan Tambah Berbahaya (BTB). Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 18 berikut:

Tabel 18. Tahapan pemeriksaan unit usaha pengolahan hasil perikanan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,1	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,3	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,4	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,2	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian Unit Usaha UPI yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) yang di laksanakan pada tahun 2021 sebanyak 117 unit usaha UPI. Capaian pada tahun 2021 ini lebih banyak bila di bandingkan dengan capaian pada tahun 2020, dimana capaian pada tahun 2020 sebanyak 33 unit usaha UPI yang diperiksa. Tingginya capaian pemeriksaan UPI pada tahun 2021 ini karena di dukung dengan perencanaan pengawasan yang di laksanakan setiap bulan dan dengan adanya data terkait UPI yang berada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Selain itu, pengawasan yang di lakukan secara rutin juga membantu Stasiun PSDKP Belawan dalam membantu capaian ini, dimana dengan di adakannya pengawasan rutin tersebut membuat tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha UPI terhadap peraturan perundang-undangan meningkat.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.239.793.978,- atau sebesar 99,05% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 242.083.000- (*Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sesuai target dengan realisasi anggaran masih sebesar 99,05% (perhitungan efisiensi dapat dilihat pada tabel 16).

Dalam melaksanakan tugas pengawasan pengolahan hasil perikanan, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan pengolahan hasil perikanan di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pengolahan hasil perikanan.

c. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Pencapaian tersebut diperoleh dari hasil pengawasan distribusi yang diperiksa kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan, lingkup wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan. Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 19 Berikut:

Tabel 19. Tahapan pemeriksaan unit usaha distribusi hasil perikanan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,1	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,3	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan Teknis	0,4	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,2	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian unit usaha distribusi yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) yang di laksanakan pada tahun 2021 sebanyak 52 unit usaha distribusi. Capaian pada tahun 2021 ini lebih banyak bila di bandingkan dengan capaian pada tahun 2020, dimana capaian pada tahun 2020 sebanyak 26 unit usaha disribusi yang diperiksa.

Pengawasan utama yang dilakukan adalah pengawasan terhadap ketertelusuran (*traceability*) distribusi ikan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian kegiatan importasi ikan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15 tahun 2011 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 121.974.179,- atau sebesar 89,78% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 135.857.000,- (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sesuai target dengan realisasi anggarannya sebesar 89,78% (perhitungan efisiensi dapat dilihat pada tabel 16).

Dalam melaksanakan tugas pengawasan distribusi hasil perikanan, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan distribusi hasil perikanan di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan

sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan distribusi hasil perikanan.

d. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pengawasan terhadap usaha budidaya ikan meliputi dokumen perizinan, obat dan pakan ikan yang digunakan. Untuk Pencapaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan usaha pembudidayaan ikan Stasiun PSDKP Belawan, maka harus memenuhi persyaratan seperti Tabel 20 Berikut:

Tabel 20. Tahapan pemeriksaan unit usaha pembudidayaan ikan dikatakan taat

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,1	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi dan Kelayakan Teknis	0,3	Berita Acara Hasil Pengawasan di Simwaskan
3	Pemeriksaan Kesesuaian Kegiatan Usaha, Sarana dan Prasarana	0,4	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN	0,2	Laporan Hasil Pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian unit usaha budidaya yang telah sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai) yang di laksanakan pada tahun 2021 sebanyak 78 unit usaha budidaya. Capaian pada tahun 2021 ini lebih banyak bila di dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020, dimana capaian pada tahun 2020 sebanyak 38 unit usaha budidaya yang diperiksa. Tingginya capaian ini karena perencanaan kegiatan pengawasan yang di laksanakan setiap bulan dengan di dukung beberapa data unit usaha pembudidayaan yang ada. Selain itu, dengan di laksanakannya pengawasan secara rutin juga memberikan dampak positif, dimana tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meningkat.

Berdasarkan perhitungan tahapan pemeriksaan tersebut diperoleh nilai sebesar 100%. Kegiatan pengawasan usaha pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan peraturan perUndang-Undang

di bidang usaha pembudidayaan ikan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan pasal 66B, yang menyatakan pelaksanaan tugas pengawas perikanan dilakukan di sentra kegiatan perikanan, area pembenihan ikan serta area pembudidayaan ikan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 169.136.412,- atau sebesar 91,92% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 184.000.000,- (*Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah*). Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh hal berikut: capaian kinerja pada IKU ini telah mencapai target dengan realisasi anggaran sebesar 91,92% (perhitungan efisiensi dapat dilihat pada tabel 16).

Dalam melaksanakan tugas pengawasan unit usaha pembudidayaan ikan, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan unit usaha pembudidayaan ikan di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 (tiga) Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas Perikanan sebanyak 61 Orang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan unit usaha pembudidayaan ikan.

3. Sasaran Program 3 : Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat

Pencapaian Sasaran Program “Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat” di identifikasikan ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu: **“Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan”**.

Capaian IKU ke-3 “Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan target yang ditetapkan sebesar 71 %. Pada tahun 2021, belum terdapat informasi pengaduan yang disampaikan oleh POKMASWAS dan ditindaklanjuti, sesuai dengan cara perhitungan Manual IKU pada perencanaan tahun 2021 apabila tidak terdapat informasi/pengaduan dari POKMASWAS maka dianggap tuntas dan memenuhi target. Dikarenakan laporan informasi/pengaduan bersifat *conditional* atau tidak dapat diprediksi dengan demikian Capaian tahun 2021 terealisasi yaitu 71 %. Capaian pada tahun 2021 ini tidak terlepas dari usaha Stasiun PSDKP Belawan yang terus berusaha meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan

perundangan-undangan terutama yang berkaitan dengan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memberikan sosialisasi. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Stasiun PSDKP Belawan dengan Pokmaswas yang ada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan, karena Pokmaswas ini merupakan kelompok organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat terutama masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Dengan diadakannya sosialisasi dan kerjasama dengan Pokmaswas tersebut, diharapkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dapat meningkat sehingga kegiatan yang melanggar peraturan perundang – undangan dapat di atasi dan diminimalisir.

Capaian IKU Ke-3 Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2021 dapat dibandingkan dengan Capaian IKU pada tahun 2020 namun tidak dapat dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya karena IKU ini baru ada pada tahun 2020. Pada tahun 2020 IKU ini terealisasi 70% sementara pada tahun 2021 terealisasi sebesar 71%. Capaian IKU ke-3 “Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, dapat dilihat pada Tabel 21 berikut.

Tabel 21. Hasil Pengukuran IKU Persentase Tindak Lanjut Informasi Pokmaswas Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2020	Capaian tahun 2021	Persentase (%)
Persentase Tindak Lanjut Informasi Pokmaswas Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	71	70	71	100%

IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 22 berikut :

Tabel 22. Perbandingan Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Informasi Pokmaswas Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tindak Lanjut Informasi Pokmaswas Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	71	71	71	71	71	71	71

Adapun realisasi penyerapan anggaran untuk pencapaian Persentase tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp. 12.600.000,- dari anggaran yang dialokasikan 12.600.000,- (*Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) atau sebesar 100% dengan tingkat efisiensi pada Sasaran Program- 3 sebesar 0%. Tingkat efisiensi “0%” tersebut dikarenakan jumlah realisasi sama dengan target yang sudah ditentukan dengan penggunaan anggaran sebesar 100%. Perhitungan capaian efisiensi anggaran untuk Sasaran Program - 3 ini dapat dilihat pada tabel 23.

Tabel 23. Perhitungan efisiensi Sasaran Program-1 “Persentase Tindak Lanjut Informasi Pokmaswas Lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Efisiensi Sasaran Strategis ($\sum(9)/(6)$) :		0,0%						
Periode : Tahun 2021								
No	Output Program pada SK tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)
2350.BID.001	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya	1	1	1	12.600.000	12.600.000	12.600.000	-
TOTAL					12.600.000	12.600.000	12.600.000	-

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Pokmaswas, Stasiun PSDKP Belawan memiliki sumber daya manusia (personil) Pengawas Perikanan sebanyak 31 Orang untuk melakukan kegiatan pengawasan usaha Pokmaswas di seluruh wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan yang meliputi 3 Satwas di 3 provinsi : Satwas PSDKP Langsa (Prov.Aceh), Satwas PSDKP Asahan (Prov. Sumatra Utara), Satwas PSDKP Rokan Hilir (Prov. Riau). Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Belawan kebutuhan Pengawas sebanyak 61 orang , dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan pengawasan belum efisien dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia Pengawas Perikanan yang dibutuhkan bagi Stasiun PSDKP Belawan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Pokmaswas.

4. Sasaran Program 4 : Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP

Dalam rangka pencapaian Sasaran Program-4 “Terselenggaranya pemantauan SDKP” diidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU yaitu: IKU ke-4 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan; dan IKU ke-5 Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* lingkup Stasiun PSDKP Belawan. IKU pada Sasaran Program- 4 ini baru ada pada tahun 2020 sehingga tidak dapat di bandingkan dengan capaian 5 tahun sebelumnya tetapi hanya dapat di bandingkan dengan capaian tahun 2020. Capaian pada tahun 2021 ini lebih besar bila di bandingkan dengan capaian pada tahun 2020. Adapun capaian IKU dari Sasaran Program-4 dapat dilihat pada tabel 24 sebagai berikut:

Tabel 24.Capaian Presentase Terselenggaranya pemantauan dan Operasi Armada SDKP Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Persentase
1	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dan diawasi menggunakan kapal pengawas	1,8	0,83	1,83	101,67%
2	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	0,04	0,03	0,0438	109,50%

Keberhasilan dalam mencapai target IKU pada Sasaran Program – 4 ini karena hal-hal sebagai berikut :

1. Bertambahnya kapal pengawas pada tahun 2021 ini, dimana pembangunan kapal pengawas Hiu 16 telah selesai dikerjakan.
2. Perencanaan hari operasi kapal pengawas dan speedboat yang baik.

3. Terlaksananya perawatan kapal pengawas dan speedboat pengawas dengan baik sehingga kegiatan terlaksana dengan baik.

IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2021-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel 25 berikut :

Tabel 25. Perbandingan Capaian IKU Presentase Terselenggaranya pemantauan dan Operasi Armada lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan renstra tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dan diawasi menggunakan kapal pengawas	1,8	1,83	0,78	1,8	1,82	1,83	1,85
Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	0,04	0,0438	0,028	0,11	0,12	0,13	0,15

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 17.680.198.000 dan sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp. 17.464.454.189 atau sebesar 98,78% dengan tingkat efisiensi pada Sasaran Program - 4 sebesar 9,3%. Tingginya tingkat efisiensi tersebut dikarenakan jumlah realisasi yang melebihi target yang sudah ditentukan. Perhitungan capaian efisiensi anggaran untuk Sasaran Program -4 ini dapat dilihat pada tabel 26.

Tabel 26. Perhitungan efisiensi Sasaran Program-4 “Persentase Terselenggaranya pemantauan dan Operasi Armada Lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya pemantauan dan operasi armada SDKP								
Efisiensi Sasaran Strategis ($\Sigma(9)/(6)$) :		9,3%						
Periode : Tahun 2021								
No	Output Program pada SK tersebut	Target	Realisasi	Capaian per Output Program (COP)	Alokasi Anggaran (Rp) per OP (AA)	Realisasi Anggaran (Rp) per OP (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) / (3)	(6)	(7)	(8) = (6) x (5)	(9) = (8) - (7)
2350.QHD.001	Operasi Kapal Pengawas	110	119	1,081818182	17.508.668.000	17.298.384.349	18.941.195.382	1.642.811.033
2350.QHD.004	Operasional Speed Boat 8 Meter (SBK)	40	40	1	171.530.000	166.069.840	171.530.000	5.460.160
TOTAL					17.680.198.000	17.464.454.189	19.112.725.382	1.648.271.193

Penjelasan masing-masing IKU pada Sasaran Program-4 Terselenggaranya Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

b. IKU ke-4 “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

IKU Presentase Cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan akan memberikan kontribusi terhadap capaian IKU Tingkat Keberhasilan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan secara nasional, yang ditargetkan oleh Direktorat Pemantauan Operasional Armada (POA) sebesar 1,8 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Pengukuran kinerja diperoleh dari perhitungan cakupan laut melalui operasi Kapal Pengawas Perikanan Hiu 01 ,Hiu 08 dan Hiu 16 sampai periode Tahun 2021. Operasi Kapal pengawas dilaut telah dilaksanakan dengan jumlah hari operasi seperti pada tabel 27.

Tabel 27.Hari Operasi Kapal Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Nama Kapal Pengawas	TW	Periode	No SPT	Tanggal Hari Operasi	Jumlah Hari Operasi	
I	KP. Hiu 016	II	1	1706 /Sta.2/PW.444/IV/2021	8 - 30 April 2021	23	
			2	2573 /Sta.2/PW.444/VI/2021	4 - 28 juni 2021	25	
		III	3	3425 /Sta.2/PW.444/VII/2021	10 - 31 Juli 2021	22	
			4	B.4248 /Sta.2/PW.530/VIII/2021	03 - 22 September 2021	20	
			5	B.4945 /Sta.2/PW.530/X/2021	23 -27 Oktober 2021	5	
II	KP. Hiu 01	I	1	0353/Sta.2/PW.444/I/2021	18 - 31 Januari 2021	14	
			2	0566/Sta.2/PW.444/II/2021	3 - 13 Februari 2021	11	
			3	0859.a /Sta.2/PW.444/II/2021	1 - 6 Maret 2021	6	
			4	1156 /Sta.2/PW.444/III/2021	10 - 23 Maret 2021	14	
		II	5	1843/Sta.2/PW.444/IV/2021	20 - 30 April 2021	11	
			6	2540 /Sta.2/PW.444/V/2021	1 - 20 Juni 2021	20	
		III	7	3625 /Sta.2/PW.444/VII/2021	10 - 31 Juli 2021	22	
			IV	8	B.4889 /Sta.2/PW.530/X/2021	08 - 09 Oktober 2021	2
				9	B.4889 /Sta.2/PW.530/X/2021	18 - 23 Oktober 2021	6
III	KP. Hiu 08	I	1	0322/Sta.2/PW.444/I/2021	15 - 29 Januari 2021	15	
			2	0539/Sta.2/PW.444/II/2021	02 - 21 Februari 2021	20	
			3	1158 /Sta.2/PW.444/III/2021	10 - 29 Maret 2021	20	
		II	4	1774/Sta.2/PW.444/IV/2021	15 - 29 April 2021	15	
			5	2411/Sta.2/PW.444/V/2021	25 - 29 Mei 2021	5	
			6	2913 /Sta.2/PW.444/VI/2021	1 - 25 Juni 2021	25	
		III	7	3462 /Sta.2/PW.444/VII/2021.	12 - 31 Juli 2021	20	
			8	4104 /Sta.2/PW.444/VIII/2021	01 -10 September 2021	10	

	IV	9	B.5751/Sta.2/PW.350/XII/2021	03 -12 Desember 2021	10
		10	B.5995/Sta.2/PW.350/XII/2021	24 -30 Desember 2021	7

Capaian IKU ke-4 ini dapat dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2020, karena IKU ini terdapat pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 0,83% dan bila dibandingkan dengan Capaian pada tahun 2021, capaian IKU ke-4 ini mengalami peningkatan sebesar 1 % dengan capaian 1,83%. Peningkatan capaian iku ke-4 ini terjadi karena pada bulan Maret tahun 2021, pembangunan kapal pengawas HIU 16 telah selesai dilaksanakan dan hal ini membuat dukungan dari kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan bertambah, sehingga cakupan WPP NRI yang di pantau menggunakan kapal pengawas lebih luas.

Berdasarkan hari operasi pada tahun 2021 diperoleh cakupan area yang mampu diawasi oleh kapal pengawas seluas 35.294 nm² (*nautica mile*) atau sebesar 1,83% melebihi dari target tahun 2021 yaitu sebesar 1,8%. Perhitungan tersebut dapat di lihat pada Gambar 2 sebagai berikut:

No	UPT PSDKP	No	Kapal Pengawas	Kelas	Total Hari	Jam Operasi (jam)	Kecepatan Dinas (NM/jam)	Jangkauan Efektif Radar (NM)	Cakupan Teoritis (CT) NM ²	Area Operasi Utama	Faktor Koreksi WPP (Fwpp)	Faktor Koreksi Kapal (Fkp)	Cakupan Aktual (CA) NM ²	%Cakupan Aktual
1	Stasiun PSDKP Belawan	12	Hiu 01	D	110	1099,17	12	12	158.280	571	0,20	0,20	6.331	0,33
		13	Hiu 08	D	152	1767,26	12	12	254.485	571	0,20	0,20	10.179	0,53
		14	Hiu 16	C	96	1043,53	15	15	234.794	571	0,20	0,40	18.784	0,97
Total									412.766				35.294	1,83

Gambar 2. Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas

Kegiatan utama yang mendukung tercapainya IKU ini adalah pelaksanaan Patroli oleh 3 (tiga) unit kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 17.298.384.349,- atau sebesar 98,80% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 17.508.668.000,-. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sesuai target beserta kegiatan utama dengan didukung realisasi anggaran 98,80%.

c. IKU Ke – 5 “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* lingkup Stasiun PSDKP Belawan akan memberikan kontribusi terhadap capaian IKU Tingkat Keberhasilan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan secara nasional, yang ditargetkan oleh Direktorat Pemantauan Operasional Armada (POA) sebesar 0,04 %. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024.

Apabila di bandingkan dengan Capaian IKU pada tahun 2020, maka capaian pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,0138% karena capaian IKU ini pada tahun 2021 sebesar 0,0438% sedangkan capaian IKU ini pada tahun 2020 sebesar 0,03%. Pengukuran kinerja diperoleh dari perhitungan Cakupan Laut melalui operasi *Speedboat* pengawasan. Pada periode tahun 2021, Operasi *Speedboat* pengawasan dilaut telah dilaksanakan dengan jumlah hari operasi sebanyak 40 hari operasi dengan dukungan *Speedboat* pengawasan sebanyak 1 Unit *Speedboat* yaitu Dolphin 014. Hari operasi *speedboat* pengawasan dapat di lihat pada tabel 28.

Tabel 28. Hari Operasi *Speedboat* Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Nama Speedboat	TW	Periode	No SPT	Tanggal Hari Operasi	Jumlah hari Operasi
IV	KP. Dolphin 014	I	1	0785 /Sta.2/TU.420/II/2021	23 - 26 Februari 2021	4
			II	2	2761 /Sta.2/TU.420/VI/2021	7 - 10 Juni 2021
		3		2991 /Sta.2/TU.420/VI/2021	21 - 24 Juni 2021	4
		III		4	3439 /Sta.2/TU.420/VII/2021	12 - 15 Juli 2021
			5	3704 /Sta.2/TU.420/VII/2021	2 - 5 Agustus 2021	4
			6	4053 /Sta.2/TU.420/VIII/2021	23 - 26 Agustus 2021	4
		IV	7	B.4870/Sta.2/KP.440/X/2021	18, 19, 21, dan 22 Oktober 2021	4
			8	B.5133/Sta.2/KP.440/X/2021	01 - 04 Nopember 2021	4
			9	B.5266/Sta.2/TU.420/XI/2021	15 - 18 Nopember 2021	4
			10	B.5418/Sta.2/TU.420/XI/2021	30 Nopember - 3 Desember 2021	4

Berdasarkan hari operasi pada Tahun 2021 diperoleh cakupan area yang mampu diawasi oleh *Speedboat* sebesar 0,0438% , melebihi dari Target Tahun 2021 yaitu sebesar 0,04% dengan presentase capaian 109,50%. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* dijelaskan pada gambar 3 berikut:

No.	NAMA KAPAL	Lokasi Penempatan	Jangkauan	Kecep	Hari	Lama	Faktor	Cakupan	Luas WPP	Cakupan (%)
			Pemantau an Visual (NM)	atan (NM/ Jam)	Oper asi (hari)	Waktu Pengawasa n (jam)	Koreksi Speedbo at (Fsb)	(Xsb) (NM2)	NRI (NM2)	
			d	v		t	Fsb	d*v*t**Fsb	A	X/A
1	Dolphin 14	Stasiun PSDKP Belawan	4	10	40	211	0,1	844	1.928.506	0,0438%

Gambar 3. Cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan speedboat

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini sebesar Rp. 166.069.840 atau 96,82% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.171.530.000,- untuk Dolphin 014. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal yaitu capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sesuai target dengan realisasi anggaran sebesar 96,82%.

5. Sasaran Program 5 : Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP

Dalam rangka pencapaian Sasaran Program 5 “Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP” di Identifikasi ke dalam 3 (tiga) IKU, yaitu: IKU ke 6 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan”, IKU ke 7 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dan IKU ke 8 “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”. Adapun capaian dari Sasaran Program 5 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 29. Capaian IKU pada Sasaran Program 5 “Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP”

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET TAHUN 2021	TARGET TW IV	CAPAIAN TW IV
1	Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100
2	Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100

No	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021		
		TARGET TAHUN 2021	TARGET TW IV	CAPAIAN TW IV
3	Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100

Penjelasan IKU pada Sasaran Program 5 “Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP” adalah sebagai berikut:

a. IKU 6 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan”.

IKU 6 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan” merupakan IKU baru dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 sebesar 100%. Pembangunan kapal Pengawas tersebut telah di laksanakan sejak tahun 2020 dengan menggunakan sistem Multiyears dan di targetkan selesai 100% pada Bulan Maret 2021. Pada tahun 2021, IKU ini telah tercapai sebesar 100%, dimana pembangunan kapal pengawas kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan telah selesai. Capaian ini di dukung dengan telah di tanda tanganinya **Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 056/Sta.2/PL.430/IVI/2021 tanggal 5 Maret 2021 antara PT. Palindo Marine sebagai penyedia jasa dengan Stasiun PSDKP Belawan sebagai pengguna jasa** . Keberhasilan Stasiun PSDKP Belawan dalam mencapai target pada IKU “Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan” karena telah dilaksanakan perencanaan dan supervisi terhadap pembangunan prasarana tersebut. Perencanaan yang matang dan supervisi dari tim pengawas pembangunan memiliki peranan krusial dalam tercapainya target kinerja pada IKU tersebut.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun sebelumnya tidak terdapat IKU tersebut. Pada tahun 2024 tidak terdapat target pada IKU Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan . Namun terdapat target capaian pada tahun 2020-2021, sehingga diharapkan pada target rencana strategis bisa tercapai. Adapun capaian dari IKU 6 pada Sasaran Program 5 dapat dilihat pada tabel 30 sebagai berikut :

Tabel 30. Capaian Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Persentase (%)
1	Persentase Penyelesaian Pembangunan Kapal Pengawas Kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.825.761.100,- (*Dua Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah*) atau sebesar 99,95% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 12.832.600.000,- (*Dua Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) . Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja pada Sub IKU ini dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan efisien. Hal ini didasari oleh beberapa hal: capaian kinerja pada IKU ini telah tercapai sesuai target beserta kegiatan utama dengan realisasi anggarannya tercapai 99,95%.

b. IKU 7 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Dalam rangka pencapaian IKU 7 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 1 (satu) data dukung yaitu: Terselenggaranya pembangunan kantor pengawasan SDKP di Satwas Langsa. Adapun Capaian IKU Ke-7 “Persentase Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Capaian IKU Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Persentase (%)
1	Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100

Penjelasan Pencapaian IKU Ke-7 dari Sasaran Program - 5 sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan adalah jumlah Prasarana Pengawasan SDKP yang selesai dibangun dibandingkan dengan target kegiatan pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Prasarana Pengawasan yang akan di bangun Stasiun PSDKP Belawan adalah pembangunan kantor pengawasan SDKP Satwas Langsa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian pembangunan sebesar 100%. Pada tahun 2021, IKU ini telah tercapai sebesar 100%, dimana pembangunan kantor pengawasan SDKP Satwas Langsa telah selesai pada bulan November tahun 2021. Capaian ini di dukung dengan telah di tanda tangannya **Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 329/Sta.2/PL.340/XI/2021 tanggal 29 November 2021 antara CV. Hafizh Putra Perkas sebagai kontraktor pelaksana (penyedia jasa) dengan Stasiun PSDKP Belawan sebagai pengguna jasa** . Keberhasilan Stasiun PSDKP Belawan dalam mencapai target pada IKU “Persentase Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” karena telah dilaksanakan perencanaan dan supervisi terhadap pembangunan prasarana tersebut. Perencanaan yang matang dan supervisi dari tim pengawas pembangunan memiliki peranan krusial dalam tercapainya target kinerja pada IKU tersebut.

IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena pada tahun sebelumnya tidak terdapat IKU tersebut. Pada tahun 2024 tidak terdapat target pada IKU Persentase Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Namun terdapat target capaian pada tahun 2021-2022, sehingga diharapkan pada target rencana strategis bisa tercapai.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.207.032.728,- atau 99,73% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.210.292.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

c. **IKU 8 “Persentase Penyelesaian Perawatan Sarana Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan”**

Capaian IKU Ke-8 “ Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Capaian IKU “Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Persentase (%)
1	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100

Penjelasan Pencapaian IKU Ke-8 dari Sasaran Program 5 sebagai berikut:

Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan adalah jumlah Sarana Pengawasan SDKP yang selesai dirawat dibandingkan dengan target kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Direktorat POA/UPT PSDKP. Sarana Pengawasan yang dilakukan perawatannya pada tahun 2021 oleh Stasiun PSDKP Belawan meliputi: 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan yaitu KP Hiu 01 dan KP Hiu 08 dan 1 (satu) unit *Speedboat*.

Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari : perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*).

Pelaksanaan kegiatan perawatan Sarana Pengawasan SDKP dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan target persentase penyelesaian perawatan sebesar 100%. Pada tahun 2021, IKU ini telah tercapai sebesar 100%, dimana perawatan 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 1 (satu) unit *Speedboat* telah selesai dilaksanakan. Perencanaan yang bagus terhadap perawatan sarana pengawasan ini merupakan indikator yang penting dalam mencapai target IKU Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan ini. Adapun perawatan yang telah dilakukan untuk 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan dapat dilihat pada tabel 33 sebagai berikut :


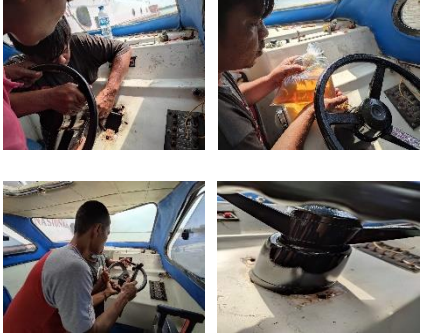


Tabel 33. Perawatan KP Hiu 01 dan KP Hiu 08 Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Nama Kapal Pengawas / Speedboat Pengawas	Kegiatan Perawatan	Nomor SPK dan Tanggal SPK	Nomor BAST dan Tanggal BAST	Yang Melakukan BAST
1	KP Hiu 01	Perbaikan Propeller	199/Sta.2/PL.421/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021	237/Sta.2/PL.430/IX/2021 tanggal 20 September 2021	PPK Stasiun PSDKP Belawan dengan Manager Operasional PT. Palindo Marine
		Technical Report- Perawatan Kontrol Panel dan Sistem Kelistrikan	232/Sta.2/PL.421/IX/2021 tanggal 16 September 2021	BA.11.01/JMM/XI/2021 tanggal 16 November 2021	KP Hiu 01 dengan Engineer/Teknisi PT. Jagad Mandiri Marine
		Perbaikan Kontrol Panel dan Kelistrikan	232/Sta.2/PL.421/IX/2021 tanggal 16 September 2021	318/Sta.2/PL.430/XI/2021 tanggal 24 November 2021	PPK Stasiun PSDKP Belawan dengan Direktur PT. Jagad Mandiri Marine
		Technical Report- Perawatan Jam Putar 1000 Jam	234/Sta.2/PL.421/IX/2021 tanggal 16 September 2021	BA.11.02/JMM/XI/2021 tanggal 16 November 2021	KP Hiu 01 dengan Engineer/Teknisi PT. Jagad Mandiri Marine
		Perawatan Berkala 1000 Jam	234/Sta.2/PL.421/IX/2021 tanggal 16 September 2021	319/Sta.2/PL.430/XI/2021 tanggal 24 November 2021	PPK Stasiun PSDKP Belawan dengan

					Direktur PT. Jagad Mandiri Marine
		Pengantian Shaft Propeller	256/Sta.2/PL.421/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021	263/Sta.2/PL.430/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021	PPK Stasiun PSDKP Belawan dengan Manager Operasional PT. Palindo Marine
2	KP Hiu 08	Technical Report- Perawatan Kontrol Panel dan Sistem Kelistrikan	228/Sta.2/PL.421/IX/2021 tanggal 16 September 2021	BA.11.03/JMM/XI/2021 tanggal 16 November 2021	KP Hiu 08 dengan Engineer/Teknisi PT. Jagad Mandiri Marine
		Perbaikan Kontrol Panel dan Kelistrikan	228/Sta.2/PL.421/IX/2021 tanggal 16 September 2021	314/Sta.2/PL.430/XI/2021 tanggal 24 November 2021	PPK Stasiun PSDKP Belawan dengan Direktur PT. Jagad Mandiri Marine
		Technical Report- Perawatan Jam Putar 1000 Jam	230/Sta.2/PL.421/IX/2021 tanggal 16 September 2021	BA.11.04/JMM/XI/2021 tanggal 16 November 2021	KP Hiu 08 dengan Engineer/Teknisi PT. Jagad Mandiri Marine
		Perawatan Berkala 1000 Jam	230/Sta.2/PL.421/IX/2021 tanggal 16 September 2021	315/Sta.2/PL.430/XI/2021 tanggal 24 November 2021	PPK Stasiun PSDKP Belawan dengan Direktur PT. Jagad Mandiri Marine

Sedangkan untuk perawatan Speedboat yang telah di laksanakan pada tahun 2021 dapat di lihat pada tabel 34 berikut

Tabel 34. Perawatan Speedboat Pengawasan Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Nama Speedboat Pengawas	Kegiatan Perawatan	Dokumentasi Kegiatan
1	Dolphin 014	Pergantian packing dan tutup knalpot mesin	
		Mengganti setir hidrolik	
		Mengganti CDI yg rusak dengan CDI baru	
		Memperbaiki main hole dek dan haluan	



IKU ini merupakan instrument dalam mengukur sejauh mana kesiapan sarana Pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Stasiun PSDKP Belawan. Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.135.072.792,- atau sebesar 99,10% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 3.163.443.000,- (*Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

6. Sasaran Program 6 : Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka pencapaian Sasaran Program ke 6 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan” Stasiun PSDKP Belawan telah mengidentifikasi ke dalam 2 (dua) IKU, yaitu: (1) IKU Ke-9 Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (2) IKU Ke-10 Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Adapun Capaian IKU pada Sasaran Program- 6 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan pada Tabel 35.

Tabel 35. Capaian IKU pada Sasaran Program- 6 “Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan”

No	Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2021		
		Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	% Capaian
1	Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93%	97,5	104,84
2	Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93%	94,88	102,02

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari Sasaran Program - 6 sebagai berikut:

a. IKU Ke-9 Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%).

Pada tahun 2021 IKU Ke-9 Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan memiliki target sebesar 93% dengan capaian pada Tahun 2021 sebesar 97,5% atau realisasi sebesar 104,84%. Tercapaiannya capaian IKU ini tidak terlepas dari peran PPNS yang telah melaksanakan penyidikan terhadap kapal yang melakukan TPKP dengan efektif dan sesuai dengan SOP serta adanya hubungan yang baik antara PPNS Stasiun PSDKP Belawan dengan instansi terkait sehingga proses penyelesaian penyidikan TPKP bisa berjalan lancar. Pada tahun 2021, Stasiun PSDKP Belawan telah menangkap dan melakukan penyidikan terhadap 18 kapal. Adapun ke 18 kapal yang di tangkap oleh Stasiun PSDKP Belawan sampai tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 36 berikut.

Tabel 36. Data kasus TPKP yang di tangani Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021.

No.	Nama Kapal	Nama Tersangka	Kebangsaan Kapal	Kewarganegaraan Tersangka	Tanggal Tertangkap	Keterangan
1.	KM. PKFB 1845	Baharuddin Lubis	Malaysia	Indonesia	30 Desember 2020	Inkracht
2.	KM. SLFA 5177	Andika	Malaysia	Indonesia	30 Desember 2020	Inkracht
3.	KM. SLFA 5227	Sutikman	Malaysia	Indonesia	30 Desember 2020	Inkracht
4.	KM. SLFA 4107	Taung Htike	Malaysia	Myanmar	24 Januari 2021	Inkracht
5.	KM. SLFA 5165	Rasim	Malaysia	Indonesia	25 Januari 2021	Inkracht
6.	KM. SLFA 5170	Darwis Siregar	Malaysia	Indonesia	25 Januari 2021	Inkracht
7.	KM. KHF 2559	Teht Zin Hein	Malaysia	Myanmar	3 Februari 2021	Inkracht
8.	KM. PKFB 1731	Paidi	Malaysia	Indonesia	24 Maret 2021	Inkracht

9.	KM. PKFB 423	Sutikno	Malaysia	Indonesia	24 Maret 2021	Inkracht
10	KM. PKFA 8487	Lee Kian Heng	Malaysia	Malaysia	17 April 2021	Inkracht
11	KM. KHF 1937	Samarth Thongmak	Malaysia	Thailand	7 Mei 2021	Inkracht
12	KM. SLFA 3802	Wona	Malaysia	Myanmar	8 Mei 2021	Inkracht
13	KM. SLFA 4598	Aung Wing / Win Soe	Malaysia	Myanmar	11 Juni 2021	Inkracht
14	KM. PKFB 1472	Myo Zaw Htun	Malaysia	Myanmar	12 Juni 2021	Inkracht
15	KM. SLFA 5124	Naing Naing	Malaysia	Myanmar	18 Juli 2021	Inkracht
16	KM. PK 6911 F	Soe Hlaing als Nyi Nyi	Malaysia	Myanmar	6 September 2021	Tahap I
17	KM. KHF 1746	SURIYON JANNOK	Malaysia	Myanmar	4 Desember 2021	Pemeriksaan
18	KM. PKFB 1749	SOE LWIN OO	Malaysia	Myanmar	8 Desember 2021	Pemeriksaan

Adapun proses perhitungan pencapaian IKU tersebut adalah seperti pada gambar 4 berikut:

No	Perkara	Tersangka	Rerefensi Nilai Berdasarkan Tahapan								TW IV		Capaian TW IV
			Gelar Perkara Awal	Sprindik	SPDP	Pemeriksaan	Pengiriman berkas	P21	Tahap II	Perkembangan Kasus	Nilai Capaian Kinerja		
Stasiun PSDKP Belawan													
1	KM SLFA 5227/ - GT/ Malaysia/ Trawl	SUTIKMAN (WN Indonesia)	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100	97,50	
2	KM SLFA 5177/ - GT/ Malaysia/ Trawl	BAHARUDIN LUBIS (WN Indonesia)	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100		
3	KM PKFB 1845/ - GT/ Malaysia/ Trawl	ANDIKA (WN Indonesia)	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100		
4	KM SLFA 4107/ 49.41 GT/ Malaysia/ Trawl	Thaung Htike / Myanmar	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100		
5	KM SLFA 5165/ 31.32 GT/ Malaysia/ Trawl	Mr. Rasim (Indonesia)	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100		
6	KM SLFA 5170/ 33.41 GT/ Malaysia/ Trawl	Mr. Darwis Siregar/Indonesia	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100		
7	KM KHF 2559/ 63.65 GT/ Malaysia/ Trawl	Thet Zin Hein/ Myanmar	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100		
8	KM PKFB 1731/ - GT/ Malaysia/ Trawl	PAIDI/Indonesia	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100		
9	KM PKFB 423/ - GT/ Malaysia/ Trawl	Sutiknoi/Indonesia	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100		
10	KM PKFA 8487/ 60.43 GT/ Malaysia/ Trawl	Lee Kian Heng (Nakhoda)/ Malaysia	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100		
11	KM KHF 1937/ Kapal OCHI/ - GT/ Malaysia/ Trawl	SAMARTH THONGMAK (Nakhoda0/Malaysia	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100		
12	KM SLFA 3802/ - GT/ Malaysia/ Trawl	Wonna, Yinmaungaye, Boo, Tangyi (ABK)/ Myanmar	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100		
13	KM SLFA 4598/ 60 GT/ Malaysia/ Trawl	Aung Win (Nakhoda)/ Myanmar	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100		
14	KM PKFB 1472/ 60 GT/ Malaysia/ Trawl	Myo Zaw Htun (Nakhoda)/ Myanmar	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100		
15	KM SLFA 5124/ 15.88 GT/ Malaysia/ Pukat Hanyut	Naing (Nakhoda)/ Myanmar	5	35	50	80	95	98	100	Tahap II	100		
16	KM PK 6911 F/ 55.92 GT/ Malaysia/ Trawl	Soe Hlaing alias Nyi Nyi (Nakhoda)/ Myanmar	5	35	50	80	95	98	100	Pengiriman berkas	95		
17	KM KHF 1746/ 69.82 GT/ Malaysia/ Trawl	Suriyon (Nakhoda)/ Thailand	5	35	50	80	95	98	100	Pemeriksaan	80		
18	KM PKFB 1749/ - GT/Malaysia/ Trawl	Soe Lwin Oo (Nakhoda)/ Myanmar	5	35	50	80	95	98	100	Pemeriksaan	80		

Gambar 4. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada capaian tahun 2020, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2021. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2021-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 36 berikut :

Tabel 36. Perbandingan Capaian IKU Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	97,5	0	93	93	93	93

Untuk mencapai indikator kinerja ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 556.500.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2021 telah terealisasi sebesar Rp.435.229.064 atau 78,21%,-.

b. IKU Ke-10 Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

Penilaian untuk IKU Ke-10 yaitu Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP Lingkup Stasiun PSDKP Belawan terdiri atas Komponen sebagai berikut :

1. Komponen Penanganan Barbuk :
 - Penyitaan Barang Bukti TPKP (Bobot 10%);
 - Penempatan atau penyimpanan barang bukti TPKP di tempat yang memadai dan pemberian identitas barang bukti (Bobot 40%);
 - Perawatan dan pengamanan barang bukti sampai berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan, proses penyidikan dihentikan (SP3) atau penitipan barang bukti tempat lain yang memadai (Bobot 45%);
 - Penyerahan tahap II (Bobot 5%);
2. Komponen Penanganan Awak Kapal TPKP :
 - Penyerahan tersangka / bukan tersangka setelah dilakukan ekspose perkara yang menyatakan kasus dilanjutkan ke tingkat penyidikan (Bobot 10%);
 - Pendataan dan penempatan tersangka/bukan tersangka di tempat yang memadai (Bobot 40%);
 - Merawat dan mengamankan awak kapal/tersangka/bukan tersangka sampai dengan berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan atau proses penyidikan dihentikan (SP3) atau tersangka dititipkan ke rutan atau di pulangkan ke kampung halaman atau diserahkan ke kantor Imigrasi/Rudenim (Bobot 45%);

- Penyerahan tahap II atau penyerahan awak kapal bukan tersangka warga negara asing (WNA) ke kantor Imigrasi/Rudeinm atau pemulangan awak kapal bukan tersangka warga negara Indonesia (WNI) ke daerah asal (Bobot 5%);

Pada tahun 2021 IKU Ke-10 Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%) memiliki target 93% dengan capaian sebesar 94,88% atau realisasi 102,02%. Keberhasilan Stasiun PSDKP Belawan dalam mencapai target pada IKU “Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk Dan Awak Kapal Lingkup Stasiun PSDKP Bedlawan” karena telah dilaksanakan penanganan barang bukti dan awak kapal baik dari kegiatan pra penyidikan, penyidikan hingga proses Tahap-II ke Kejaksaan Negeri setempat. dengan output P-21 dari penyidikan yang telah dilaksanakan. Kegiatan penanganan barang bukti dan awak kapal lingkup Stasiun PSDKP Belawan dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga capaian target kinerja dapat terpenuhi.

IKU ke-10 tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada capaian tahun 2020, karena merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2021. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2021-2024. Untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 37 berikut :

Tabel 37. Perbandingan Capaian IKU Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93	94,88	0	93	93	93	93

Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp.419.522.310,- atau 99,79% dari total anggaran Rp.420.400.000,-

7. Sasaran Program - 7 : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP

Dalam rangka pencapaian Sasaran Program- 7 “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP” telah mengidentifikasi ke dalam 10 (sepuluh) IKU, yaitu: (1) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (3) Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (4) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (5) Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (6)Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (7) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (8) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan; (9)Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan); (10) Nilai I Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan.

Penjelasan Pencapaian masing-masing IKU dari Sasaran Program 7 sebagai berikut:

(1) IKU 11 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu SLO (Surat Laik Operasi). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap triwulan atau setahun 4 kali. Pemenuhan Dokumen “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” pada Tahun 2021 terealisasi dengan nilai indeks sebesar 88,92 atau 111,15% dari target tahun 2021 yaitu dengan nilai Indeks 80. Untuk nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat di lihat pada tabel 38 berikut

Tabel 38. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
U1	Persyaratan	3,403
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,435
U3	Waktu Pelayanan	3,500
U4	Biaya / Tarif	3,968

U5	Produksi Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,629
U6	Kompetensi Pelaksana	3,452
U7	Perilaku Pelaksana	3,532
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,742
U9	Sarana dan Prasarana	3,742
Nilai Indeks		3,557
Nilai SKM setelah dikonversi (NI x 25)		88,92

Keberhasilan Stasiun PSDKP Belawan dalam mencapai target pada IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan” karena telah dilaksanakan pelayanan publik penerbitan SLO oleh Stasiun PSDKP Belawan dengan prima. Hal tersebut berimplikasi langsung karena telah dilakukannya Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan terkait performa pelayanan publik Stasiun PSDKP Belawan dalam kurun waktu triwulanan. Berdasarkan tingginya penilaian pelayanan publik oleh masyarakat berimplikasi pada capaian target kinerja dapat terpenuhi.

IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 sehingga tidak dapat di bandingkan 5 tahun sebelumnya akan tetapi hanya dapat di bandingkan dengan capaian tahun 2020. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020, capaian IKU tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,9% pada tahun 2021 karena pada tahun 2020 capaian IKU tersebut sebesar 88,02. Sedangkan untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 39 berikut :

Tabel 39. Perbandingan Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan	80	88,92	80	80	80	80	80

(2) IKU 12 “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait pelayanan yang ada di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu LVHPI. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan cara survei. Survei kepuasan masyarakat dilakukan setiap triwulan atau setahun 4 kali. Capaian IKU Ke-12 Pemenuhan Dokumen “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Belawan” pada Tahun 2021 tercapai 90,47 dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 80 atau dengan presentase capaian 113,09%. Pencapaian IKU tersebut dapat dilihat pada tabel 40 berikut:

Tabel 40. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI Tahun 2021 Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
U1	Persyaratan	3,700
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,600
U3	Waktu Penyelesaian	3,800
U4	Biaya / Tarif	4,000
U5	Produksi Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,400
U6	Kompetensi Pelaksana	3,500
U7	Perilaku Pelaksana	3,500
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,400
U9	Sarana dan Prasarana	4,000
Nilai Indeks		3,619
Nilai SKM setelah dikonversi (NI x 25)		90,47

Keberhasilan Stasiun PSDKP Belawan dalam mencapai target pada IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI lingkup Stasiun PSDKP Belawan” karena telah dilaksanakan pelayanan publik penerbitan LVHPI oleh Stasiun PSDKP Belawan dengan prima. Hal tersebut berimplikasi langsung karena telah dilakukannya Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan terkait performa pelayanan publik Stasiun PSDKP Belawan dalam kurun waktu triwulanan. Berdasarkan tingginya penilaian pelayanan publik oleh masyarakat berimplikasi pada capaian target kinerja dapat terpenuhi.

IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. IKU ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada tahun 2020, karena merupakan IKU baru

dan baru ada pada Tahun 2021. untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 41 berikut :

Tabel 41. Perbandingan Capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI lingkup Stasiun PSDKP Belawan	80	90,47	0	80	80	80	80

(3) IKU 13 “Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Penilaian untuk IKU Ke-13 yaitu Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Belawan terdiri atas Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. IKU ke-13 “ Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” telah di lakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal V KKP pada tahun 2021 dan hasil penilaian tersebut tertuang dalam Nota Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor : 1112/ITJ.5/KP.750/XII/2021 Perihal : Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahun 2021. Pada Nota dinas tersebut, Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai 78,98 atau terealisasi sebesar 105,31% dari target tahun 2021 yang sebesar 75. Capaian Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat dilihat pada tabel 42 berikut :

Tabel 42. Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Nama Komponen	Nilai
1	Komponen Pengungkit	40,48
2	Komponen Hasil	38,50
Total Nilai		78,98

IKU Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Belawan merupakan indikator kinerja baru dan baru ada pada tahun 2021 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020. Sedangkan untuk melihat perbandingan capaian IKU ini dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 43 berikut :

Tabel 43. Perbandingan Capaian IKU Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Nilai WBK Lingkup Stasiun PSDKP Belawan	75	78,98	0	75	75	75	75

(4) IKU 14 “Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan”

Pengembangan SDM sebagai sumber daya pengawasan SDKP, menekankan manusia sebagai pelaku pengawasan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pengawasan SDKP.

IKU yang digunakan adalah “indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dimana capaian yang diperoleh melalui metode adopsi langsung dari atasan dengan target telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 73. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu: 1) Kualifikasi; 2) Kompetensi; 3) Kinerja; dan 4) Disiplin. Pada Tahun 2021 capaian IKU indeks Profesional ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai sebesar 81,27 atau 111,33 % dari target tahun 2021 sebesar 73 . Capaian nilai IKU ke-14 “indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 44 berikut.

Tabel 44. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (Bobot 25)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		Total	Keterangan
			IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase		
1	Stasiun PSDKP Belawan	75	12,07	48,28%	39,2	98%	25	83,33%	5	100%	81,27	Tinggi

Keberhasilan Stasiun PSDKP Belawan dalam mencapai target pada IKU “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” karena telah pengikutsertaan seminar/workshop/bimtek oleh pegawai dan staf lingkup Stasiun PSDKP Belawan. Keaktifan pegawai/staf lingkup Stasiun PSDKP Belawan dalam mengikuti seminar/workshop/bimtek berdampak langsung dalam peningkatan kapasitas SDM pegawai dan staf tersebut yang berpengaruh pada capaian target kinerja dapat terpenuhi.

IKU Ke-14 “indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” ini baru ada pada tahun 2019 sehingga tidak dapat di bandingkan dengan capaian 5 tahun sebelumnya tetapi hanya dapat di bandingkan dengan capaian tahun 2019 dan tahun 2020. Capaian pada tahun 2021 ini lebih besar 10,03 bila di bandingkan dengan capaian pada tahun 2019 dan lebih besar 0,79 bila di bandingkan dengan capaian pada tahun 2020. Perbandingan capaian IKU “indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” pada 2019 sampai tahun 2021 dapat di lihat pada tabel 45 berikut

Tabel 45. Perbandingan capaian IKU “indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” pada 2019 sampai tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021
1	indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan	71,24	80,48	81,27

Sedangkan untuk melihat perbandingan capaian IKU “indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan target renstra tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 46 berikut :

Tabel 46. Perbandingan Capaian IKU “indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dengan renstra tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2020 - 2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
“indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan”	73	81,27	72	73	73	73	73

(5) IKU ke-15 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengukuran capaian indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan ditargetkan dalam satu tahun dengan bobot nilai 90, IKU ini merupakan IKU baru yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perhitungan capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2021 didapatkan dari hasil Rekonsiliasi yang dilakukan oleh internal PSDKP maupun Biro perencanaan KKP. Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu: 1) Aspek Kepatuhan; 2) Aspek Kesesuaian; 3) Aspek Ketercapaian; dan 4) Aspek Ketepatan. Pada tahun 2021 IKU ke-15 “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” memperoleh nilai sebesar 96,08 atau 106,76%. Adapun rincian nilai capaian IKU Ke- 15 “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” dapat di lihat pada tabel 47 berikut.

Tabel 47. Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

SKOR	Aspek Penilaian			
	Kepatuhan	Kesesuaian	Ketercapaian	Ketepatan
Bobot	25%	25%	30%	20%
Skor Per Aspek	100	100	104,31	100
Skor Dikali Bobot	25%	25%	26,08	20%
Total Skor	96,08%			

Capaian pada tahun 2021 ini mengalami kenaikan sebesar 1,33% dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 dengan nilai capaian sebesar 94,75%. Keberhasilan Stasiun PSDKP Belawan dalam mencapai target pada IKU “Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” karena telah sesuai dengan dokumen Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Manual IKU dan Aplikasi *Kinerjaku* dalam suatu kesatuan.

Kesesuaian dokumen tersebut sangat diperlukan sehingga keakuntabilisan dan konsistensi berpengaruh pada capaian target kinerja dapat terpenuhi.

(6) IKU Ke-16 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU Ke-16 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2020 (bobot 10%);
- 2) Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- 3) Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019 (bobot 20%);
- 4) Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
- 5) Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Belawann) secara tepat waktu (bobot 20%).

Pada tanggal 4-5 November 2021, telah di lakukan pengukuran atau penilaian mandiri oleh Satker dengan didampingi oleh Inspektorat I dan Inspektorat II KKP untuk pengukuran IKU ke-16 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Belawan”. Hasil finalisasi dari pengukuran IKU ke-16 “Tingkat Kepatuhan Pengeloaalan BMN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” ini dilaksanakan pada tanggal 26 November 2021. Dari hasil finalisasi penilaian tersebut, Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai capaian sebesar 100%. Hasil penilaian tersebut disampaikan melalui memorandum Diktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Nomor : 29079/PSDKP.1/RC.610/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 Perihal : Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan PBJ dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2021. Capaian pada tahun 2021 ini lebih besar dari target tahun 2021 yang sebesar 72,5%. Keberhasilan di dalam mencapai target IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” ini karena pengelolaan BMN yang dilakukan secara baik, dimana Dokumen RKMBN, Revaluasi Aset, BAST dan Laporan BMN dilaksanakan dengan teratur dan dimonitoring oleh atasan.

Capaian IKU ke -16 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” pada tahun 2021 ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada tahun 2021, karena IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Belawan” merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2021.

(7) IKU Ke-17 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

IKU Ke-17 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan yaitu Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/ Jasa lingkup Unit Kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- 1) Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- 2) Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- 3) Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%);
- 4) Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Pada tanggal 4-5 November 2021, telah di lakukan pengukuran atau penilaian mandiri oleh Satker dengan didampingi oleh Inspektorat I dan Inspektorat II KKP untuk pengukuran IKU ke-17 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan”. Hasil finalisasi dari pengukuran IKU ke-17 “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” ini dilaksanakan pada tanggal 22-23 November 2021. Dari hasil finalisasi penilaian tersebut, Stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai capaian sebesar 96,29%”. Hasil penilaian tersebut disampaikan melalui memorandum Dikrotat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Nomor : 29079/PSDKP.1/RC.610/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 Perihal : Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan PBJ dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PSDKP Tahun 2021. Capaian pada tahun 2021 ini lebih besar dari target tahun 2021 yang sebesar 72,5%. Tercapainya IKU “Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” ini karena :

- a. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang di lakukan sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku;
- b. Pengelolaan dokumen PBJ yang dilakukan dengan baik;
- c. Keaktifan team pengadaan berkomunikasi dengan team inspektorat ketika akan melakukan pengadaan barang dan jasa yang memerlukan review dari team inspektorat.

Capaian IKU ke -17 “Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” pada tahun 2021 ini tidak dapat di bandingkan dengan capaian pada tahun 2020, karena IKU “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2021.

(8) IKU Ke-18 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan Aplikasi Bitrix24.com. Data dan informasi yang disajikan dalam Bitrix24.com Stasiun PSDKP Belawan diantaranya berupa : Berita Pengawasan, kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Profil Stasiun PSDKP Belawan serta Satuan Pengawas (Satwas) SDKP dan Wilker di lingkup Stasiun PSDKP Belawan, Informasi Pelayanan Publik di Stasiun PSDKP Belawan, Update Data Penerbitan SLO.

Perhitungan capaian Presentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2021 mengadopsi dari data yang diberikan oleh Eselon I yaitu dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 98,89% melebihi dari target yang di tetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 84%. Capaian tersebut diperoleh dari 3 komponen yaitu : 1) Dokumen, 2) Keikutsertaan dan 3) Keaktifan, dimana dari ketiga komponen tersebut komponen Dokumen dan keaktifan stasiun PSDKP Belawan memperoleh nilai 100 sedangkan nilai keikutsertaan memperoleh nilai 94,44.

Bila dibandingkan dengan Capaian IKU pada tahun 2020, IKU Ke-18 ini mengalami penurunan sebesar 1,11% dengan capaian sebesar 100% pada tahun 2020. Penurunan persentase capaian tersebut terjadi pada item Keikutsertaan, dimana pada tahun 2021 nilai keikutsertaan Stasiun PSDKP Belawan sebesar 94,44% sedangkan pada tahun 2020, nilai keikutsertaan nya mencapai nilai 100%. Menurunnya nilai keikutsertaan tersebut karena pada tahun 2020, pegawai yang terdaftar pada aplikasi Bitrix.com mutasi ke UPT lain dan belum di gantikan. Capaian IKU Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan dapat diliha pada gambar 5 berikut:

3. Hasil capaian IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar Satker UPT PSDKP Tahun 2021, sebagai berikut:

No	UPT PSDKP	TARGET	RELISASI				CAPAIAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	JAKARTA	84%	96.11%	100.00%	100.00%	100.00%	99.03%
2	BITUNG	84%	100.00%	100.00%	98.00%	100.00%	99.50%
3	LAMPULO	84%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4	BATAM	84%	62.22%	98.89%	98.89%	98.89%	89.72%
5	BENOA	84%	53.33%	100.00%	96.11%	100.00%	87.36%
7	TUAL	84%	92.22%	100.00%	100.00%	100.00%	98.06%
6	BELAWAN	84%	98.89%	98.89%	98.89%	98.89%	98.89%

Gambar 5. Capaian IKU Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan

(9) IKU Ke-19 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan *spending review* terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 13 (tiga belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu; Capaian Output, Revisi DIPA, Halaman IV DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OMSPAN) Kementerian Keuangan.

Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2021 sebesar 91,02%. Target nilai IKPA yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu dengan nilai BAIK (89). Capaian tersebut dapat dilihat pada gambar 6 berikut:

440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Nilai	100.00	76.16	100.00	58.00	98.00	100.00	100.00	100.00	95.12	85.68	99.80	100.00	90.00	91.02	100%	91.02
		Bobot	5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	5	5			
		Nilai Akhir	5.00	3.81	5.00	5.80	7.84	5.00	5.00	15.00	9.51	14.57	4.99	5.00	4.50			
		Nilai Aspek	92.05			89.00				95.15			95.00					

Gambar 6. Capaian Kinerja Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Capaian nilai IKPA pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,2% di dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020, dimana capaian pada tahun 2020 sebesar 92,22%.

(10) IKU Ke-20 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan oleh Satuan Kerja Stasiun PSDKP Belawan pada tahun 2021 kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id). Pada tahun 2021, capaian IKU “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” sebesar 88,11%. Capaian ini lebih tinggi bila di bandingkan dengan target tahun 2021 yang sebesar 86%. Tercapainya target IKU ini karena target kinerja pada IKU “Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Belawan” direncanakan berada pada triwulan selanjutnya. IKU ke-20 pada periode tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2020, karna IKU ini merupakan IKU baru dan baru ada pada tahun 2021.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Belawan dengan Satker UPT Sejenis/Setara

Stasiun PSDKP Belawan telah membandingkan hasil capaian kinerja dengan Satker UPT setara/ sejenis pada tahun 2021. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang di bandingkan sebanyak 20 IKU dengan capaian 19 Kinerja tercapai 100% dan 1 Kinerja tidak tercapai 100%. Bila dibandingkan hasil capaian kinerja tahun 2021 dengan 5 (lima) UPT satker setara/ sejenis Stasiun PSDKP Belawan , Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut adalah sebagai berikut;

- Stasiun Belawan memperoleh capaian tinggi sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu pada IKU ke-11,13,17 dan 18;
- Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan nilai sama sebanyak 6 (enam) IKU yaitu pada IKU ke-1,3,6,7,15 dan 16;
- Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan nilai sedang sebanyak 7 (tujuh) IKU ke-4,5,10,12,14,19 dan 20;
- Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan nilai rendah sebanyak 3 (tiga) IKU yaitu pada IKU ke-2,8 dan 9.

Rincian detail perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2021 sebagaimana table berikut:

1. IKU-1 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	95	100	105,26%
2	Stasiun PSDKP Biak	95	100	105,26%
3	Stasiun PSDKP Ambon	95	100	105,26%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	95	100	105,26%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	95	100	105,26%
6	Stasiun PSDKP Belawan	95	100	105,26%

2. IKU-2 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100,00%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100,00%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100,00%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100,00%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100,00%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	96,3	96,30%

3. IKU-3 Persentase tindak lanjut informasi/aduan POKMASWAS lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	71	100	120,00%
2	Stasiun PSDKP Biak	71	92,75	120,00%
3	Stasiun PSDKP Ambon	71	100	120,00%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	71	100	120,00%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	71	100	120,00%
6	Stasiun PSDKP Belawan	71	100	120,00%

4. IKU-4 Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dan diawasi menggunakan kapal pengawas (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	1,18	1,20	101,69%
2	Stasiun PSDKP Biak	1,68	2,04	120,00%
3	Stasiun PSDKP Ambon	2,28	2,35	103,07%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	2,35	1,54	65,53%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	3,15	4,60	120,00%
6	Stasiun PSDKP Belawan	1,8	1,83	101,67%

5. IKU-5 Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	0,21	0,22	104,76%
2	Stasiun PSDKP Biak	0,04	0,08	120,00%
3	Stasiun PSDKP Ambon	0,12	0,17	120,00%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	0,05	0,07	120,00%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	0,13	0,36	120,00%
6	Stasiun PSDKP Belawan	0,04	0,043	109,50%

6. IKU-6 Persentase penyelesaian pembangunan kapal pengawas kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
2	Pangkalan PSDKP Batam	100	100	100%

7. IKU-7 Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%

4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%

8. IKU-8 Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100,00%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100,00%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100,00%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100,00%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100,00%
6	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100,00%

9. IKU-9 Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	93	100	107,53%
2	Stasiun PSDKP Biak	93	100	107,53%
3	Stasiun PSDKP Ambon	93	100	107,53%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	93	100	107,53%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	93	100	107,53%
6	Stasiun PSDKP Belawan	93	97,5	104,84%

10. IKU-10 Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	93	100	107,53%
2	Stasiun PSDKP Biak	93	100	107,53%
3	Stasiun PSDKP Ambon	93	100	107,53%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	93	100	107,53%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	93	99,28	106,75%

6	Stasiun PSDKP Belawan	93	94,88	102,02%
---	-----------------------	----	-------	---------

11. IKU-11 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	81,83	102,29%
2	Stasiun PSDKP Biak	80	85,14	106,43%
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	91,37	114,21%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	91,93	114,91%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	91,91	114,89%
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	88,92	111,15%

12. IKU-12 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80	90,34	112,93%
2	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	87,00	108,75%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	92,57	115,71%
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	90,47	113,09%

13. IKU-13 Nilai WBK Stasiun PSDKP Belawan (nilai)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	75	78,56	104,75%
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	75	80,88	107,84%
3	Pangkalan PSDKP Benoa	75	84,98	113,31%
4	Pangkalan PSDKP Batam	75	78,41	104,55%
5	Pangkalan PSDKP Bitung	75	80,92	107,89%
6	Pangkalan PSDKP Jakarta	75	79,91	107,00%
7	Pangkalan PSDKP Tual	75	84,17	112,23%

8	Stasiun PSDKP Belawan	75	78,98	105,31%
---	-----------------------	----	-------	---------

14. IKU-14 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan (indeks)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	73	75,18	102,99%
2	Stasiun PSDKP Biak	73	79,23	108,53%
3	Stasiun PSDKP Ambon	73	72,33	99,08%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	73	78,42	107,42%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	73	78,76	107,89%
6	Stasiun PSDKP Belawan	73	81,27	111,33%

15. IKU-15 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	90	97,52	108,36%
2	Stasiun PSDKP Biak	90	96,41	107,12%
3	Stasiun PSDKP Ambon	90	96,02	106,69%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	90	97,49	108,32%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	90	93,63	104,03%
6	Stasiun PSDKP Belawan	90	96,08	106,76%

16. IKU-16 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	72,5	100	120,00%
2	Stasiun PSDKP Biak	72,5	95	120,00%
3	Stasiun PSDKP Ambon	72,5	100	120,00%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	72,5	95	120,00%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	72,5	100	120,00%
6	Stasiun PSDKP Belawan	72,5	100	120,00%

17. IKU-17 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	72,5	100	120,00%
2	Stasiun PSDKP Biak	72,5	93,3	120,00%
3	Stasiun PSDKP Ambon	72,5	92,15	120,00%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	72,5	84,38	116,39%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	72,5	100	120,00%
6	Stasiun PSDKP Belawan	72,5	96,29	120,00%

18. IKU-18 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	84	100	119,05%
2	Stasiun PSDKP Biak	84	100	119,05%
3	Stasiun PSDKP Ambon	84	97,08	115,57%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	84	97,08	115,55%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	84	97,78	116,40%
6	Stasiun PSDKP Belawan	84	98,89	117,73%

19. IKU-19 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	89	97,95	110,06%
2	Stasiun PSDKP Biak	89	91,85	103,20%
3	Stasiun PSDKP Ambon	89	92,26	103,66%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	89	94,12	105,75%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	89	91,07	102,33%
6	Stasiun PSDKP Belawan	89	91,02	102,27%

20.IKU-20 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (nilai)

No	UPT	Target	Capaian	Presentase Capaian
1	Stasiun PSDKP Cilacap	86	93,93	109,27%
2	Stasiun PSDKP Biak	86	86,19	100,22%
3	Stasiun PSDKP Ambon	86	86,9	101.05%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	86	88,74	103,19%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	86	88,10	102,44%
6	Stasiun PSDKP Belawan	86	88,11	102,45%

D. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang dikelola Stasiun Pengawasan SDKP Belawan pada Tahun 2021 sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2021 tanggal 13 November 2020, mendapat alokasi dana sebesar Rp. 52.078.585.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Pada tanggal 16 Februari 2021, anggaran Stasiun PSDKP Belawan mengalami revisi menjadi Rp. 52.065.525.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 032.05.2.440831/2021 tanggal 16 Februari 2021. Pada tanggal 04 Mei 2021, anggaran Stasiun PSDKP Belawan mengalami revisi dari Rp. 52.065.525.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) menjadi Rp. 53.055.607.000 (Lima Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah). Pada tanggal 13 Agustus 2021, anggaran Stasiun PSDKP Belawan mengalami revisi dari Rp. 53.055.607.000 (Lima Puluh Tiga Milyar Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 49.438.013.000 (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Belas Ribu Rupiah). pada bulan November 2021, anggaran Stasiun PSDKP Belawan mengalami revisi dari Rp. 49.438.013.000 (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Belas Ribu Rupiah) menjadi Rp. 49.272.101.000,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Satu Ribu Rupiah).

Realisasi anggaran tahun 2021 yang telah dicapai oleh Stasiun Pengawasan SDKP Belawan sampai Triwulan IV 2021 sebesar 98,90 % atau sebesar Rp 48.729.298.897,- (Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dari total anggaran yang di alokasikan yaitu Rp. 49.272.101.000,-

(Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Satu Ribu Rupiah). Rincian penyerapan anggaran per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 22 berikut.

Tabel 48. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan periode Januari – Desember 2021

Kode	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2350	Pemantauan dan Operasi armada	34.984.133.000	34.729.070.809	99,27
2351	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	1.080.900.000	957.700.697	88,60
2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	267.000.000	256.240.512	95,97
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.088.940.000	1.053.393.607	96,74
2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP	11.851.128.000	11.732.893.272	99
Jumlah		49.272.101.000	48.729.298.897	98,90

Sumber: Bagian Keuangan Stasiun PSDKP Belawan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada TW IV Tahun 2021 Nilai NPSS Stasiun PSDKP Belawan sebesar 103,24% dengan pencapaian 1 IKU Kuning dan 19 IKU Hijau (realisasi 100%).
2. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Belawan Triwulan IV Tahun 2021 menyajikan capaian sasaran strategis Stasiun PSDKP Belawan pada tahun anggaran 2021, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi, Stasiun PSDKP Belawan berlandaskan kepada tujuan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan didalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Belawan (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

B. Saran

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler (setiap bulan, triwulan dan Belawann) untuk dapat mengawal pencapaian kinerja.
2. Komitmen semua pihak untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan SDM pengawasan yang kompeten serta sarana dan prasarana pengawasan secara bertahap.
4. Mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi potensi pengawasan SDKP, dengan meningkatkan peran Satwas, Wilker lingkup Stasiun PSDKP Belawan.
5. Melaksanakan perbaikan speedboat Napoleon 028 pada tahun 2022.

Rencana tindak lanjut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler.
2. Mengusulkan SDM Pengawas mengikuti diklat dan meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan.
3. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari Satwas lingkup Stasiun PSDKP Belawan dengan melakukan monitoring dan rapat bulanan Triwulanan.
4. Mengajukan anggaran perbaikan speedboat Napoleon 028 pada pagu indikatif anggaran Tahun 2022.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON: (021) 3519070 FAKSIMILE: (021) 3520346
WEBSITE: www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL: ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andri Fahrulsyah**
Jabatan : Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 20 Agustus 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan Dan Perikanan
Belawan



Andri Fahrulsyah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN**


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	95
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
3.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat	3. Persentase tindak lanjut informasi/aduan Pokmaswas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	71
4.	Terselenggaranya Pemantauan dan Operasi Armada SDKP	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	1,80
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	0,04
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	6. Persentase penyelesaian pembangunan Kapal kelas C lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		7. Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
		8. Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	100
6.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	9. Persentase Penyelesaian Penyidikan TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
		10. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk dan Awak Kapal TPKP lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	93
7.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	11. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80
		12. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	80

NO		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		13. Nilai WBK lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	75
		14. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Indeks)	73
		15. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	90
		16. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	72,5
		17. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	72,5
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Stasiun PSDKP Belawan (%)	84
		19. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	89
		20. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Stasiun PSDKP Belawan (Nilai)	86

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	34.984.133.000
	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1.246.812.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	267.000.000
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.088.940.000
2.	Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	11.851.128.000
	Total	49.438.013.000


Jakarta, 20 Agustus 2021

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber
Daya Kelautan Dan Perikanan
Belawan



Andri Fahrulsyah



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI

memberikan

PENGHARGAAN

kepada

Stasiun PSDKP Belawan

atas prestasinya sebagai unit kerja
berpredikat **Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**
di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
periode penilaian 2020 s.d. Agustus 2021

Jakarta, 3 Desember 2021
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

